

PENYUSUNAN INDEKS WILLIAMSON

**Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
Tahun 2019**

PRAKATA

Puji syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan taufik, hidayah dan kekuatan Nya sehingga penulisan Laporan Akhir Indeks Williamson dapat diselesaikan. Laporan ini merupakan laporan akhir penyusunan Indeks Williamson Tahun 2019 yang disusun oleh Bidang Ekonomi Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kota Surakarta.

Bidang Ekonomi Bappeda dan Tim Penyusun mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak terutama segenap pimpinan dan pegawai di Bappeda Kota Surakarta yang telah membantu mengalokasikan anggaran, support data, dan memberikan berbagai masukan yang konstruktif dari berbagai pihak dalam menyelesaikan dan menyempurnakan kajian ini.

Semoga kajian dapat bermanfaat untuk kemajuan pembangunan di Kota Surakarta.

Surakarta, 2019

Bidang Ekonomi Bappeda Surakarta

DAFTAR ISI

PRAKATA	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan	4
1.3. Manfaat	4
1.4. Lingkup Kegiatan	4
1.5. Sistematika	5
BAB II KONDISI MAKROEKONOMI KOTA SURAKARTA	7
2.1. Kependudukan dan Ketenagakerjaan	7
2.2. Kemiskinan dan Ketimpangan di Surakarta	15
2.3. Pertumbuhan Ekonomi di Kota Surakarta	18
BAB III KONSEP DAN METODE KAJIAN	25
3.1. Aspek Kependudukan dalam Pembangunan Daerah ...	25
3.2. Pengangguran, Kemiskinan, Pembangunan Ekonomi Lokal	29
3.3. Kependudukan dan Pertumbuhan Ekonomi	32
3.4. Kemiskinan	34
3.5. Ketimpangan Distribusi Pendapatan dan Pertumbuhan Ekonomi	37
3.6. Konsentrasi Kemiskinan	39
3.7. Metodologi	41
3.7.1. Pendekatan Kajian	41
3.7.2. Sumber dan Ketersediaan Data	42
3.7.3. Prosedur Penentuan PDRB Kecamatan	43
3.7.4. Kerangka Pikir Kajian	44
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN	45
4.1. Analisa Kemiskinan dan Konsumsi Penduduk	45
4.2. Analisa Pengangguran	54

4.3.	Analisa Proxy PDRB Kecamatan	57
4.3.1.	Pendekatan Proporsi PDRB Atas Dasar Harga Konstan	57
4.3.2.	Pendekatan Proporsi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku	59
4.4.	Ketimpangan Distribusi Pendapatan	60
BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI		65
4.1.	Kesimpulan	65
4.2.	Rekomendasi	66
DAFTAR PUSTAKA		67
LAMPIRAN		69

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Jumlah Penduduk Kota Surakarta Menurut Kecamatan	8
Tabel 2.2.	Distribusi Kelompok Umur dan Rasio jenis Kelamin	9
Tabel 2.3.	Angkatan Kerja Kota Surakarta 2018	10
Tabel 2.4.	Angkatan Kerja Kota Surakarta Berdasarkan Pendidikan Tertinggi Tahun 2017	11
Tabel 2.5.	Jenis Pekerjaan Penduduk Kota Surakarta. 2017	12
Tabel 2.6.	Jenis Pekerjaan Penduduk Kota Surakarta Berdasarkan Lapangan Usaha. 2017	13
Tabel 2.7.	Perbandingan Tingkat Pengangguran Tahun 2017 ...	14
Tabel 2.8.	Perbandingan Tingkat Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Tingkat Keparahan Kemiskinan (P2) Tahun 2017	16
Tabel 2.9.	Perbandingan Tingkat Kemiskinan 2015-2017	17
Tabel 2.10.	Perbandingan Pertumbuhan Sektor Ekonomi 2011 dan 2018	21
Tabel 2.11.	Struktur PDRB Kota Surakarta Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2010 dan 2018	23
Tabel 4.1.	Perbandingan Tingkat Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Tingkat Keparahan Kemiskinan (P2) Tahun 2018	46
Tabel 4.2.	Perbandingan Tingkat Kemiskinan 2010-2018	48
Tabel 4.3.	Perbandingan garis Kemiskinan 2010-2018	50
Tabel 4.4.	Korelasi PDRB Harga Konstan dan Jumlah Penduduk Miskin	52
Tabel 4.5.	Perbandingan Pengeluaran Perkapita 2010-2018 (Ribuan Rp/tahun)	53
Tabel 4.6.	Korelasi PDRB Harga Konstan dan Tingkat Pengangguran	55
Tabel 4.7.	Korelasi Jumlah Pengangguran dan Jumlah Penduduk Miskin	56
Tabel 4.8.	PDRB Kecamatan Harag Konstan Tahun 2009. 2010. dan 2011	58
Tabel 4.9.	Proporsi PDRB Kecamatan Harga Konstan Tahun 2009. 2010. dan 2011	58
Tabel 4.10.	Proxy PDRB Kecamatan Tahun 2010-2018 Pendekatan Proporsi PDRB Harga Konstan 2010	58
Tabel 4.11.	Proporsi PDRB Kecamatan Harga Berlaku	59
Tabel 4.12.	Proxy PDRB Kecamatan Tahun 2010-2018 Pendekatan Proporsi PDRB Harga Berlaku	59
Tabel 4.13.	Indeks Williamson di Kecamatan dan Kota Surakarta Tahun 2010-2018 Pendekatan PDRB Harga Konstan	60

Tabel 4.14.	Indeks Williamson di Kecamatan dan Kota Surakarta Tahun 2010-2018 Pendekatan PDRB Harga Berlaku	60
Tabel 4.15.	Perbandingan Indeks Gini 2010-2015	63

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.	Tingkat Kemiskinan VS P1 VS P2 Kota Surakarta Tahun 2010-2018	16
Gambar 2.2.	Hubungan Tingkat Pengangguran dan Kemiskinan .	18
Gambar 2.3.	Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kota Surakarta Tahun 2010-2018	19
Gambar 3.1.	Kurva Lorenz	38
Gambar 4.1.	Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dengan Tingkat Pengangguran	55
Gambar 4.2.	Hubungan Tingkat Pengangguran dan Tingkat Kemiskinan	56
Gambar 4.3.	Gambar Indeks Williamson Atas Dasar PDRB Harga Konstan	60
Gambar 4.4.	Gambar Indeks Williamson Atas Dasar PDRB Harga Berlaku	61
Gambar 4.5.	Perbandingan Indeks Williamson Pendekatan Proporsi PDRB dan Pendekatan Jumlah Penduduk .	62

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi daerah dengan aspek kependudukan memiliki keterkaitan yang erat. Keterkaitan penduduk dan pembangunan ekonomi mengandung beberapa makna yang penting. *Pertama*, kependudukan, atau dalam hal ini adalah penduduk, merupakan pusat dari seluruh kebijaksanaan dan program pembangunan yang dilakukan. Pembangunan baru dikatakan berhasil, jika mampu meningkatkan kesejahteraan penduduk dalam arti yang luas. Kedua, keadaan dan kondisi kependudukan yang ada sangat mempengaruhi dinamika pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Jumlah penduduk yang besar jika diikuti dengan kualitas penduduk yang memadai akan merupakan pendorong bagi pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya jumlah penduduk yang besar jika diikuti dengan tingkat kualitas yang rendah, menjadikan penduduk tersebut sebagai beban bagi pembangunan. Ketiga, dampak dinamika kependudukan baru akan terasa dalam jangka yang panjang. Karena dampaknya baru terasa dalam jangka waktu yang panjang, sering kali permasalahan penduduk dalam pembangunan terabaikan.

Aspek kependudukan dalam pembangunan daerah membawa beberapa permasalahan. Pertama, pertumbuhan penduduk yang tinggi membawa konsekuensi munculnya permasalahan yang berkaitan dengan tingkat kesejahteraan penduduk. Pemerintah daerah memiliki tugas dan kewajiban untuk menjamin setiap penduduk mendapatkan kesejahteraan. Tingginya pertumbuhan penduduk di daerah membuat tugas tersebut perlu mendapatkan perhatian ekstra. Kedua, pertumbuhan penduduk yang tinggi membawa dampak pada meningkatnya angka penduduk usia kerja (penduduk yang berusia 15 tahun ke atas) dan hal ini memperbesar jumlah angkatan kerja. Peningkatan angkatan kerja mengharuskan

pemerintah daerah untuk mampu mendorong dan memberikan stimulus yang mengarah pada peningkatan pemberdayaan masyarakat. bahkan pemerintah daerah dituntut untuk mampu menciptakan lapangan kerja. Ketiga, pertumbuhan penduduk yang tinggi berpotensi menciptakan kemiskinan dan ketimpangan. apabila tidak diikuti dengan kualitas sumber daya manusia serta pertumbuhan ekonomi daerah yang mendorong aktivitas ekonomi masyarakat.

Secara umum tujuan pembangunan daerah adalah sebagai berikut: (1) peningkatan standar hidup setiap orang. (2) penciptaan berbagai kondisi yang memungkinkan tumbuhnya rasa percaya diri. dan (3) peningkatan kebebasan setiap orang. Untuk mencapai hal tersebut. pemerintah daerah menyusun kebijakan yang diharapkan mampu menghilangkan atau mengurangi permasalahan yang sering muncul dalam pembangunan. sehingga langkah yang ditempuh oleh pemerintah daerah diharapkan mampu: (1) mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan antar wilayah. (2) memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan. (3) menciptakan atau menambah lapangan kerja. (4) meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. dan (5) menjaga kelestarian sumberdaya alam.

Di sisi lain dalam pembangunan daerah seringkali terjadi munculnya “rantai yang hilang” dalam arti bahwa kinerja pembangunan ekonomi daerah justru tidak mampu menekan tingkat kemiskinan secara signifikan dan menyebabkan peningkatan disparitas atau kesenjangan distribusi pendapatan yang semakin melebar. Dalam teori *trickle down effect*. hasil pembangunan daerah tidak dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat atau tidak menetes ke bawah. Bila kondisi ini terjadi. pembangunan daerah berhasil dari aspek ukuran makroekonomi daerah. namun belum mencapai tujuan dan sasaran seperti yang diharapkan. Kondisi ini memunculkan adanya *trade off* antara pertumbuhan dan pemerataan. Dari sisi pertumbuhan. pembangunan daerah dikatakan berhasil apabila terbukti terjadi kenaikan output yang terukur dari nilai PDRB yang

bersumber dari sektoral ekonomi. Di sisi yang lain, dari aspek pemerataan belum dapat dikatakan berhasil apabila pertumbuhan yang terjadi tidak diikuti oleh aspek pemerataan. Bila kondisi ini terjadi, upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk seperti yang telah disebutkan menjadi tidak berhasil, atau dapat pula terjadi situasi dimana pertumbuhan ekonomi daerah tinggi, namun tidak diikuti dengan pengurangan tingkat kemiskinan dan disparitas.

Studi yang dilakukan oleh Bank Dunia menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi di berbagai negara ternyata tidak mereduksi kemiskinan, dan kesenjangan distribusi pendapatan semakin melebar. Beberapa penelitian lain menghasilkan kondisi yang berbeda yaitu pertumbuhan ekonomi dapat mengurangi kemiskinan secara langsung, atau penurunan tingkat kemiskinan terjadi melalui penurunan tingkat ketimpangan distribusi pendapatan. Dengan demikian tidak dapat disimpulkan secara cepat bahwa pertumbuhan ekonomi berdampak pada pengurangan tingkat kemiskinan dan kesenjangan distribusi pendapatan, namun pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu prasyarat dalam pengurangan tingkat kemiskinan dan kesenjangan distribusi pendapatan.

Atas dasar hal tersebut sangat penting bagi Pemerintah Kota Surakarta untuk mengkaji apakah pembangunan ekonomi yang telah terjadi selama ini mampu menekan angka kemiskinan dan ketimpangan distribusi pendapatan. Hal ini akan menjadi dasar bagi Pemerintah Kota Surakarta dalam merumuskan kebijakan dan strategi yang diperlukan agar pembangunan ekonomi mampu secara nyata menekan angka kemiskinan dan kesenjangan distribusi pendapatan, sehingga tujuan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai mengingat tujuan pembangunan bukan semata-mata kenaikan pertumbuhan ekonomi semata, namun juga memiliki dimensi lain yaitu mengurangi tingkat kemiskinan dan kesenjangan distribusi pendapatan sebagai salah satu ukuran kesejahteraan masyarakat.

1.2. Tujuan

Tujuan dari kajian ini adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan analisa terhadap kemiskinan dan konsumsi penduduk di Kota Surakarta.
- b. Melakukan analisa terhadap tingkat pengangguran di Kota Surakarta.
- c. Melakukan analisa Proxy PDRB Kecamatan menggunakan pendekatan atas dasar harga konstan dan atas dasar harga berlaku.
- d. Melakukan analisa terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Kota Surakarta.

1.3. Manfaat

Melalui kajian ini diharapkan dapat diketahui dan dianalisis kondisi makroekonomi Kota Surakarta yang dititikberatkan pada relevansinya dengan permasalahan ketimpangan distribusi pendapatan dan ketimpangan kemiskinan antarkecamatan di wilayah Kota Surakarta.

Dengan demikian, akan diperoleh informasi yang lebih komprehensif dan analitis perbandingan kondisi ketimpangan distribusi pendapatan dan kemiskinan antarkecamatan di Kota Surakarta sehingga dapat dipergunakan sebagai salah satu pijakan dalam penyusunan kebijakan dan strategi guna mengatasi permasalahan tersebut.

1.4. Lingkup Kegiatan

Lingkup kegiatan ini meliputi berbagai hal yang berkaitan dengan ketimpangan distribusi pendapatan dan kemiskinan, yang dirinci sebagai berikut:

- a. Melakukan analisis kondisi makroekonomi Kota Surakarta yang dititikberatkan pada relevansinya dengan ketimpangan distribusi pendapatan dan kemiskinan.

- b. Melakukan pengukuran serta menganalisis tingkat ketimpangan distribusi pendapatan Kota Surakarta.
- c. Melakukan pengukuran serta menganalisis tingkat ketimpangan kemiskinan Kota Surakarta.
- d. Merumuskan usulan kebijakan dan strategi dalam mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan ketimpangan distribusi pendapatan dan kemiskinan.

1.5. Sistematika

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang, tujuan, manfaat, serta lingkup kegiatan dari kajian tentang ketimpangan distribusi pendapatan dan kemiskinan antarkecamatan di Kota Surakarta. Latar belakang dalam bab ini menguraikan dasar serta arti penting dari kajian ini.

BAB II KONDISI MAKROEKONOMI KOTA SURAKARTA

Dalam bab ini akan diuraikan kondisi makroekonomi Kota Surakarta secara umum serta relevansi kondisi tersebut dengan aspek kependudukan, pertumbuhan ekonomi, ketimpangan distribusi pendapatan dan kemiskinan, sehingga diperoleh gambaran yang lebih jelas dan focus mengenai ketimpangan distribusi pendapatan dan kemiskinan dalam konteks makroekonomi Kota Surakarta.

BAB III KONSEP DAN METODE KAJIAN

Dalam bab ini akan diuraikan tentang dasar teori yang berkaitan dengan ketimpangan distribusi pendapatan, kemiskinan, metode pengumpulan data, serta metode analisis data.

BAB IV HASIL ANALISIS

Dalam bab ini akan diuraikan tentang analisis umum kondisi makroekonomi Kota Surakarta yang memiliki relevansi dengan ketimpangan distribusi pendapatan dan kemiskinan. serta hasil pengukuran dan analisis ketimpangan distribusi pendapatan dan kemiskinan di Kota Surakarta.

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Dalam bab ini akan diuraikan tentang kesimpulan dan rekomendasi dari hasil analisis dan pembahasan ketimpangan distribusi pendapatan serta kemiskinan di Kota Surakarta.

BAB II

KONDISI MAKROEKONOMI KOTA SURAKARTA

2.1. Kependudukan dan Ketenagakerjaan

Ketimpangan memiliki relevansi erat dengan masalah kependudukan dan ketenagakerjaan. Ketimpangan dipengaruhi bukan saja dari aspek pendapatan, namun juga struktur penduduk baik dari sisi jumlah, usia, latar belakang pekerjaan, dan sebagainya. Semakin besar jumlah penduduk berpotensi mendorong semakin besar pula kemungkinan terjadinya ketimpangan distribusi pendapatan.

Berdasarkan data Disdukcapil Kota Surakarta, pada Tahun 2018 jumlah penduduk Kota Surakarta mencapai 569.711 jiwa. Perbandingan antara penduduk berjenis kelamin laki-laki dan perempuan relatif hampir seimbang, yaitu laki-laki sebanyak 280.517 dan perempuan 289.194. Dengan demikian rasio jenis kelamin adalah sebesar 96,99; yang berarti bahwa pada setiap 100 penduduk perempuan terdapat sebanyak 97 penduduk laki-laki. Penduduk terbanyak berada di Kecamatan Banjarsari dan yang paling sedikit berada di Kecamatan Serengan. Kecamatan Banjarsari memiliki penduduk sebanyak 181.114 atau 31,79% dan peringkat kedua adalah Kecamatan Jebres yang mencapai 144.051 jiwa atau 25,64%. Kecamatan Serengan memiliki jumlah penduduk paling sedikit yaitu 54.323 atau hanya 9,54%.

Meski Kecamatan Banjarsari memiliki jumlah penduduk terbanyak, namun karena memiliki area paling luas, kepadatan penduduk tertinggi bukanlah Kecamatan Banjarsari melainkan Kecamatan Pasar Kliwon yaitu 17.915 per km². Tingkat kepadatan penduduk menggambarkan perbandingan jumlah penduduk dengan total luas wilayah. Kecamatan Banjarsari memiliki tingkat kepadatan sebesar 12.229 per km². Secara keseluruhan tingkat kepadatan

penduduk Kota Surakarta pada tahun 2018 mencapai 12.936. naik sedikit dibanding tahun 2017 yang mencapai 12.767 per km².

Tabel 2.1. Jumlah Penduduk Kota Surakarta Menurut Kecamatan

No	Kecamatan		Jumlah Penduduk		Luas Wilayah (KM ²)	Kepadatan Penduduk
	Kode	Nama	Orang	%		
1	33.72.01	LAWEYAN	101.873	17,88%	8,64	11.791
2	33.72.02	SERENGAN	54.323	9,54%	3,19	17.029
3	33.72.03	PASAR KLIWON	86.350	15,16%	4,82	17.915
4	33.72.04	JEBRES	146.051	25,64%	12,58	11.610
5	33.72.05	BANJARSARI	181.1149	31,79%	14,81	12.229
Jumlah			569.771	100,00%	44,04	12.936

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta, 2018.

Dari aspek kelompok umur. penduduk dengan usia terbanyak adalah kelompok umur 35-39 tahun yang mencapai 48.071 orang atau 8,44%. Meski ini merupakan kelompok umur dengan jumlah penduduk terbanyak. namun sebenarnya dibandingkan dengan kelompok umur yang lain tidak memiliki selisih jumlah yang signifikan. terutama hingga kelompok umur usia 15-19 tahun yang mencapai 45.865 atau 8,05%. Rasio jenis kelamin usia 0 hingga 39 tahun memiliki nilai di atas 100 (lebih banyak laki-laki dibanding perempuan). dan usia 40 tahun ke atas memiliki rasio jenis kelamin di bawah 100 (lebih banyak perempuan dibanding laki-laki).

Tabel 2.2. Distribusi Kelompok Umur dan Rasio jenis Kelamin

No	Kelompok Umur	Pria	Wanita	Jumlah Penduduk
1	0-4	19.376	18.561	37.937
2	5-9	22.316	21.617	43.933
3	10-14	23.133	21.853	44.986
4	15-19	23.129	22.736	45.865
5	20-24	21.518	21.009	42.527
6	25-29	20.571	20.373	40.944
7	30-34	20.939	20.853	41.792
8	35-39	24.033	24.038	48.071
9	40-44	21.658	21.960	43.618
10	45-49	19.808	20.834	40.642
11	50-54	17.879	19.736	37.615
12	55-59	15.521	17.681	33.202
13	60-64	12.243	13.755	25.998
14	65-69	8.397	9.281	17.678
15	70-74	4.342	5.882	10.224
16	>=75	5.654	9.025	14.679
Jumlah		280.517	289.194	569.771

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta, 2019.

Penduduk usia kerja Kota Surakarta pada tahun 2018 mencapai 413.554. Jumlah ini naik disbanding tahun 2017 yang mencapai 410.000 orang, atau naik sebesar 0,8%. Dari jumlah penduduk usia kerja tahun 2018 tersebut terdiri dari 198.444 laki-laki dan 215.110 perempuan. Penduduk usia kerja terdiri dari angkatan dan bukan angkatan kerja, dan angkatan kerja sendiri terdiri dari penduduk yang bekerja dan pengangguran terbuka.

Dari jumlah penduduk usia kerja tersebut, jumlah angkatan kerja tahun 2018 Kota Surakarta sebesar 271.375, sedikit menurun disbanding tahun 2017 yang berjumlah 271.527 orang. Dengan demikian Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada tahun 2018 65,62%, sedikit menurun dibandingkan 2017 yang mencapai 66,10%. Dari jumlah angkatan kerja tersebut, angkatan kerja laki-laki berjumlah 149.688 dan perempuan sebanyak 121.687.

Jumlah pengangguran di Kota Surakarta per Agustus 2018 mencapai 11.910, menurun dibandingkan 2017 yang mencapai 12.133. Dari jumlah pengangguran tersebut, sebanyak 7.858 laki-laki

dan 4.052 perempuan. Dengan demikian tingkat pengangguran di Kota Surakarta per Agustus tahun 2018 mencapai 4,38%. Angka ini lebih rendah dibandingkan tahun 2017 yang mencapai 4,47%. Tingkat pengangguran 2018 ini lebih rendah dibandingkan dengan tingkat pengangguran di Provinsi Jawa Tengah yang mencapai 4,50%

Tabel 2.3. Angkatan Kerja Kota Surakarta 2018

Kegiatan	Jenis Kelamin (Orang)		Total
	Laki laki	Perempuan	
ANGKATAN KERJA	149.688	121.687	271.375
Bekerja	141.830	117.635	259.465
Pengangguran	7.858	4.052	11.910
BUKAN ANGGKATAN KERJA	48.756	93.423	142.179
Sekolah	23.985	28.048	52.033
Mengurus Rumah Tangga	10.372	59.036	69.408
Lainnya	14.399	6.339	20.738
PENDUDUK USIA KERJA	198.444	215.110	413.554

Sumber: Pusat Data dan Informasi Ketenagakerjaan. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2019.

Sebagian besar angkatan kerja tersebut berpendidikan SMA dan SMK. yaitu 124.540 atau sebesar 45,89% dan yang terkecil berpendidikan diploma yaitu 21.306 atau 7,85%. Dari jumlah angkatan kerja tersebut. sebanyak 11.910 orang merupakan pengangguran dan dari jumlah pengangguran yang ada. pengangguran terbesar adalah mereka yang berpendidikan SMK. yaitu 3.372 atau 28,31% dan SMA 2.750 atau 23,08% dari total jumlah penganggur. Dengan demikian pengangguran di Kota Surakarta tahun 2018 didominasi oleh lulusan SMA dan SMK. Jumlah lulusan sarjana yang menganggur di Kota Surakarta adalah 2.123 atau 17,82%. Angka ini menunjukkan peningkatan cukup tajam dibandingkan tahun 2017 yang mencapai 1.177 orang atau sebesar 9,70% dari total jumlah penganggur.

Tabel 2.4. Angkatan Kerja Kota Surakarta Berdasarkan Pendidikan Tertinggi Tahun 2018

Kegiatan	Pendidikan (Orang)						Jumlah
	SD	SMTp	SMA	SMK	DI/II/II I/ AKADE MI	UNIVERSITAS	
ANGKATAN KERJA	47.021	39.551	64.544	59.996	21.306	38.957	271.375
Bekerja	46.077	38.263	61.794	56.624	19.873	36.834	259.465
Pengangguran Terbuka	944	1.288	2.750	3.372	1.433	2.123	11.910
BUKAN ANGKATAN KERJA	21.668	41.904	41.191	24.768	4.216	8.432	142.179

Sumber: Pusat Data dan Informasi Ketenagakerjaan. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2019.

Dari sisi jumlah penduduk yang bekerja, sebanyak sebagian besar penduduk yaitu 97.612 orang atau 37,62% berprofesi sebagai tenaga produksi, operator alat-alat angkutan dan pekerja kasar dan yang terkecil adalah tenaga usaha pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, dan perburuan yang mencapai 1.629 atau 0,62%. Hal ini disebabkan karena kondisi geografis Surakarta yang menyebabkan sulitnya sektor tersebut untuk berkembang. Dengan melihat banyaknya penduduk yang bekerja di bidang tenaga penjualan, tenaga usaha jasa, serta tenaga produksi, operator alat-alat angkutan dan pekerja kasar, maka Kota Surakarta dapat digambarkan sebagai kota perdagangan, jasa, dan industri yang didukung dengan bidang transportasi.

Tabel 2.5. Jenis Pekerjaan Penduduk Kota Surakarta. 2018

Jenis Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1. Tenaga Profesional. Teknisi Dan Tenaga Lain Ybdi	12.976	12.398	25.374
2. Tenaga Kepemimpinan Dan Ketatalaksanaan	5.022	329	5.351
3. Pejabat Pelaksana. Tenaga Tata Usaha Dan Tenaga Ybdi	11.476	11.443	22.919
4. Tenaga Usaha Penjualan	32.687	40.778	73.465
5. Tenaga Usaha Jasa	9.373	18.922	28.295
6. T U Tani. Kebun. Ternak ² . Ikan. Hutan Dan Perburuan	1.367	262	1.629
Jenis Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
7/8/9. Tenaga Produksi Op Alat Angkutan Dan Pekerja Kasar	64.109	33.503	97.612
X/00. Lainnya	4.820	0	4.820
Total	141.830	117.635	259.465

Sumber: Pusat Data dan Informasi Ketenagakerjaan. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2019.

Bila dikaitkan dengan antara jumlah penduduk yang bekerja dengan lapangan usaha atau sektor ekonomi. maka terlihat sebagian besar penduduk yaitu 74.304 atau 28,63% bekerja di sektor perdagangan besar. eceran. rumah makan dan hotel. selanjutnya sektor industry pengolahan yaitu sebesar 57.460 atau 22,14% dan urutan ketiga adalah sektor penyediaan akomodasi dan makan minum yaitu 30.573 atau 11,78%.

Di sektor industri perdagangan besar dan eceran. serta sektor pengolahan sebagian besar adalah pekerja laki-laki sementara sektor penyediaan akomodasi dan makan minum sebagian pekerja adalah perempuan. Secara keseluruhan tenaga kerja laki-laki mencapai 54,66% dan perempuan 45,34%. Tenaga kerja perempuan cukup menonjol dominasinya di sektor penyediaan akomodasi dan makan minum. sektor jas kesehatan dan kegiatan sosial. serta sektor jasa lainnya.

Tabel 2.6. Jenis Pekerjaan Penduduk Kota Surakarta Berdasarkan Lapangan Usaha. 2018

Lapangan Usaha	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
A Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1736	262	1.998
B Pertambangan dan Penggalian	.470	0	470
C Industri Pengolahan	30.764	26.696	57.460
D Pengadaan Listrik dan Gas	374	0	374
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	1.000	512	1.512
F Konstruksi	8.866	558	9.424
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil	39.490	34.814	74.304
H Transportasi dan Pergudangan	12.526	2.466	14.992
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	10.601	19.972	30.573
J Informasi dan Komunikasi	2.827	321	3.148
K Jasa Keuangan dan Asuransi	3.541	3.612	7.153
L Real Estat	759	0	759
M.N Jasa Perusahaan	5.377	1.851	7.228
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial W	5.549	1.319	6.868
P Jasa Pendidikan	6.156	6.683	12.839
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	778	2.474	3.252
R.S.T.U Jasa Lainnya	11.016	16.095	27.111
Total	141.830	117.635	259.465

Sumber: Pusat Data dan Informasi Ketenagakerjaan, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2019.

Permasalahan pengangguran merupakan permasalahan yang saat ini menjadi perhatian khusus pemerintah termasuk pemerintah daerah. Pengangguran akan mendorong timbulnya permasalahan sosial lainnya. Oleh karena itu kebijakan dan strategi pembangunan daerah yang ditempuh harus diarahkan pada upaya pengurangan tingkat pengangguran. Kenaikan jumlah pengangguran yang lebih besar dibandingkan dengan kenaikan jumlah angkatan kerja akan mendorong peningkatan tingkat pengangguran, namun bila kenaikan jumlah angkatan kerja lebih besar dibandingkan dengan kenaikan jumlah pengangguran, maka tingkat pengangguran akan turun.

Tingkat pengangguran di Surakarta pada tahun 2017 mencapai 4,47% dan pada tahun 2018 turun menjadi 4,39%. Jumlah ini tergolong kecil bila dibandingkan dengan tingkat pengangguran di provinsi Jawa Tengah yang besarnya 4,51% dan tingkat nasional yang mencapai 5,34%. Bila dibandingkan dengan daerah lain di Jawa Tengah, posisi Surakarta berada di tengah-tengah yaitu peringkat 20 dari 35 daerah di Jawa Tengah dan peringkat ini turun dibandingkan tahun 2017 yang menempati peringkat 18.

Tabel 2.7. Perbandingan Tingkat Pengangguran Tahun 2018

Wilayah Jateng	Tahun								Naik/Turun	
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2017	2018	2017-2018	2010-2018
PROVINSI JAWA TENGAH	6,21	7,07	5,61	6,01	5,68	4,99	4,57	4,51	-0,06	-1,7
Kabupaten Cilacap	9,75	10,82	7,29	6,68	5,65	8,01	6,3	7,48	1,18	-2,27
Kabupaten Banyumas	7,37	6,61	5,11	5,45	5,37	6,37	4,62	4,19	-0,43	-3,18
Kabupaten Purbalingga	3,82	5,1	5,02	5,63	5,13	4,84	5,33	6,06	0,73	2,24
Kabupaten Banjarnegara	3,1	4,97	3,69	4,16	4,06	5,05	4,72	4	-0,72	0,9
Kabupaten Kebumen	8,02	4,73	3,58	3,52	3,25	4,14	5,58	5,52	-0,06	-2,5
Kabupaten Purworejo	3,4	5,3	3,2	5,15	5,1	4,01	3,64	4,51	0,87	1,11
Kabupaten Wonosobo	4,04	4,92	5,21	5,82	5,34	4,47	4,18	3,44	-0,74	-0,6
Kabupaten Magelang	2,97	6,83	4,38	6,13	7,45	5,16	2,44	2,91	0,47	-0,06
Kabupaten Boyolali	3,9	5,81	4,43	5,44	4,95	2,03	3,67	2,16	-1,51	-1,74
Kabupaten Klaten	4,5	7,63	3,7	5,34	4,75	2,51	4,35	3,11	-1,24	-1,39
Kabupaten Sukoharjo	7,4	6,27	6,1	5,98	4,6	4,52	2,27	2,78	0,51	-4,62
Kabupaten Wonogiri	4,7	3,82	3,46	3,61	3,45	3,07	2,38	2,28	-0,1	-2,42
Kabupaten Karanganyar	6,62	5,78	5,82	3,84	3,54	3,6	3,17	2,34	-0,83	-4,28
Kabupaten Sragen	4,09	8,43	5,88	5,63	6,04	4,51	4,55	4,82	0,27	0,73
Kabupaten Grobogan	4,6	5,33	4,2	6,1	4,25	5,22	3,02	2,24	-0,78	-2,36
Kabupaten Blora	5,49	6,9	4,75	6,23	4,3	4,68	2,85	3,26	0,41	-2,23
Kabupaten Rembang	4,89	7,22	5,75	5,97	5,23	4,51	3,19	2,87	-0,32	-2,02
Kabupaten Pati	6,22	11,17	11,98	7,29	6,37	4,43	3,83	3,61	-0,22	-2,61
Kabupaten Kudus	6,22	8,32	5,89	8,07	5,03	5,04	3,56	3,33	-0,23	-2,89
Kabupaten Jepara	4,56	5,48	4,29	6,34	5,09	3,12	4,84	3,78	-1,06	-0,78
Kabupaten Demak	5,69	5,03	8,4	7,08	5,17	6,02	4,47	7,16	2,69	1,47
Kabupaten Semarang	6,25	6,16	4,87	3,9	4,38	2,57	1,78	2,28	0,5	-3,97
Kabupaten Temanggung	3,6	3,54	3,39	4,87	3,19	1,5	2,97	3,24	0,27	-0,36

Wilayah Jateng	Tahun								Naik/Turun	
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2017	2018	2017-2018	2010-2018
Kabupaten Kendal	5,57	6,54	6,31	6,43	6,15	7,07	4,93	6,06	1,13	0,49
Kabupaten Batang	6,48	6,66	5,88	7,02	7,42	4,56	5,82	4,23	-1,59	-2,25
Kabupaten Pekalongan	4,04	6,91	5,08	4,78	6,03	5,1	4,39	4,41	0,02	0,37
Kabupaten Pemalang	11,45	7,37	4,85	6,48	7,44	6,53	5,59	6,21	0,62	-5,24
Kabupaten Tegal	7,48	10,59	6,12	6,89	8,47	9,52	7,33	8,45	1,12	0,97
Kabupaten Brebes	8,21	11,08	8,22	9,61	9,53	6,49	8,04	7,27	-0,77	-0,94
Kota Magelang	13,28	11,51	8,99	6,75	7,38	6,43	6,68	4,88	-1,8	-8,4
Kota Surakarta	8,73	7,7	6,29	7,22	6,16	4,53	4,47	4,39	-0,08	-4,34
Kota Salatiga	10,22	9,02	6,84	6,21	4,46	6,43	3,96	4,28	0,32	-5,94
Kota Semarang	8,98	7,65	6,01	6,02	7,76	5,77	6,61	5,29	-1,32	-3,69
Kota Pekalongan	7	8,06	7,67	5,28	5,42	4,1	5,05	6,13	1,08	-0,87
Kota Tegal	14,22	9,77	8,75	9,32	9,2	8,06	8,19	7,94	-0,25	-6,28

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2019.

2.2. Kemiskinan dan Ketimpangan

Kemiskinan merupakan kondisi seseorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak. Dalam kemiskinan, terdapat dua ukuran yang dipergunakan, yaitu tingkat kedalaman dan tingkat keparahan. Tingkat kemiskinan Surakarta selama 2010-2018 terlihat menunjukkan tren penurunan dari 13,96% di tahun 2010 menjadi 9,08% di tahun 2018 atau setiap tahun tingkat kemiskinan rata-rata turun sebesar -5,23%. Dalam hal tingkat kedalaman kemiskinan, pada tahun 2018 Kota Surakarta memiliki nilai 1,47 dengan rata-rata selama 2010-2018 sebesar 1,66 sedangkan dalam tingkat keparahan kemiskinan sebesar 0,35 dengan rata-rata selama 2010-2018 sebesar 0,38.

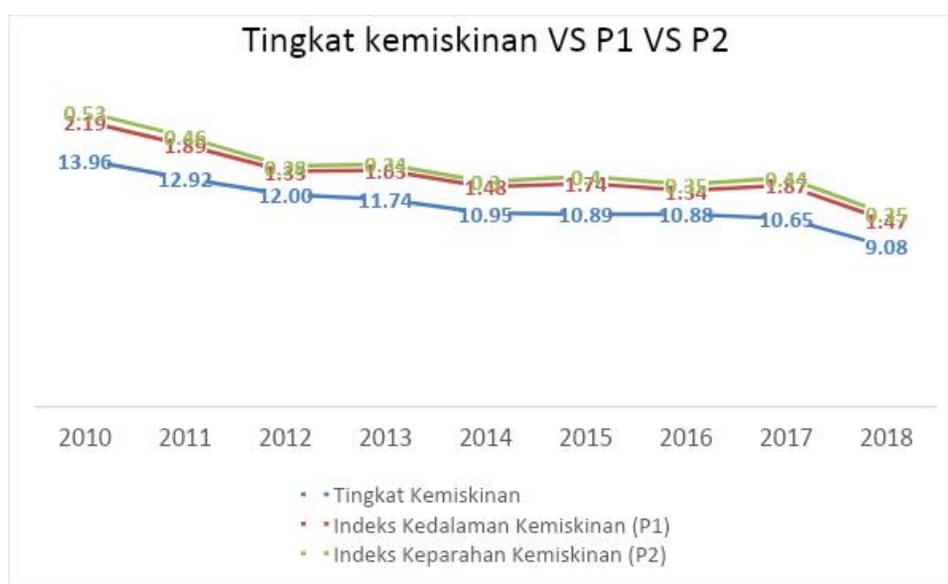
Selama 2010-2018 setiap tahun tingkat kedalaman kemiskinan Kota Surakarta rata-rata turun sebesar -4,86% dan tingkat keparahan kemiskinan rata-rata turun sebesar -5,05% per tahun. Selama 2010-2018 terlihat garis kemiskinan terus mengalami kenaikan. Rata-rata pertumbuhan garis kemiskinan Surakarta selama 2010-2018 mencapai 5,32% dan rata-rata pertumbuhan ini sedikit lebih kecil dibandingkan dengan provinsi Jawa Tengah. Tren antara tingkat

kemiskinan. kedalaman kemiskinan (P1). dan keparahan kemiskinan (P2) terlihat memiliki pola fluktuasi yang sama.

Tabel 2.8. Indikator Kemiskinan Surakarta 2010-2018

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Tingkat Kemiskinan	13,96	12,92	12,00	11,74	10,95	10,89	10,88	10,65	9,08
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	2,19	1,89	1,33	1,63	1,48	1,74	1,34	1,87	1,47
Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2)	0,53	0,46	0,28	0,34	0,3	0,4	0,35	0,44	0,35
Garis Kemiskinan	306.584	326.233	361.517	371.918	385.467	406.840	430.293	448.062	464.063

Sumber: BPS Kota Surakarta, 2019.



Sumber: BPS Kota Surakarta, 2019.

Gambar 2.1. Tingkat Kemiskinan VS P1 VS P2 Kota Surakarta Tahun 2010-2018

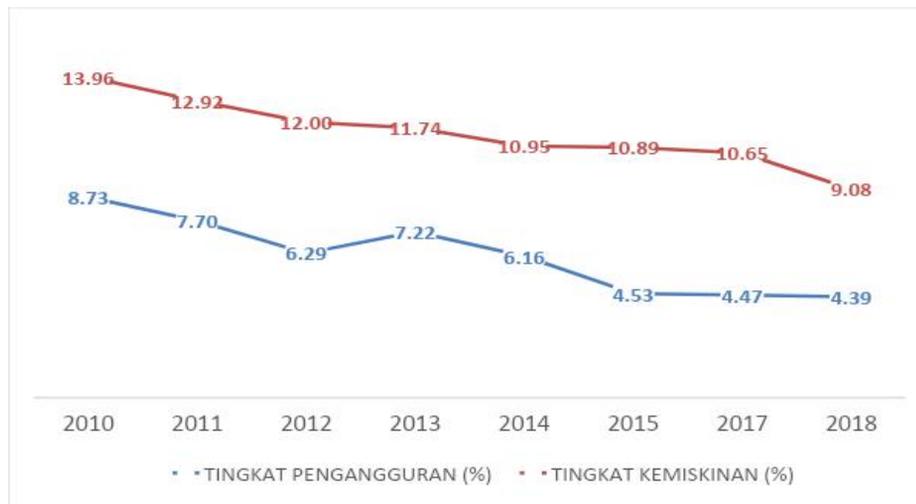
Berdasarkan RPJMN Tahun 2015 – 2019. berkaitan dengan Agenda Pembangunan Wilayah khususnya berkenaan dengan capaian kinerja penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran di wilayah Provinsi Jawa-Bali. sasaran target penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran Wilayah Jawa-Bali dirumuskan sebagai berikut.

Tabel 2.9. Perbandingan Tingkat Kemiskinan 2015-2019

Wilayah	Tingkat Kemiskinan (Persen)				
	2015	2016	2017	2018	2019
DKI Jakarta	3,4	3,2	3,0	2,7	2,5
Jawa Barat	8,9	8,2	7,6	6,9	6,3
Banten	5,3	4,9	4,5	4,1	3,7
Jawa Tengah	13,1	12,2	11,3	10,4	9,5
D.I. Yogyakarta	13,8	12,8	11,8	10,9	9,9
Jawa Timur	12,0	11,2	10,4	9,6	8,7

Sumber: Laporan Penanggulangan Kemiskinan Kota Surakarta, 2018.

Berdasarkan sasaran RPJMN di atas. Surakarta mampu melampaui sasaran nasional yang besarnya pada tahun 2018 mencapai 10,4% untuk wilayah Jawa Tengah. Tingkat kemiskinan Surakarta bahkan mampu melampaui sasaran RPJMN pada tahun 2019 yang mencapai 9,5%. Kemiskinan secara teoritis memiliki hubungan yang erat dengan pengangguran. Hubungan antara tingkat pengangguran dengan tingkat kemiskinan menunjukkan hubungan yang searah atau berbanding lurus. Hal ini berarti peningkatan pengangguran akan berdampak pada peningkatan kemiskinan. karena semakin banyak penduduk yang bekerja berarti menunjukkan semakin tinggi kemampuan konsumsi mereka.



Sumber: BPS Kota Surakarta, 2019.

Gambar 2.2. Hubungan Tingkat Pengangguran dan Kemiskinan

2.3. Pertumbuhan Ekonomi di Surakarta

Permasalahan ketimpangan distribusi pendapatan merupakan permasalahan yang sering dihadapi oleh berbagai daerah, bahkan negara. Ketimpangan ini dapat memicu berbagai permasalahan sosial lainnya sehingga memerlukan perhatian khusus, karena tidak jarang aspek ketimpangan ini kurang mendapatkan respon yang cepat mengingat ketimpangan merupakan sesuatu yang abstrak, hanya sebagai sebuah indikator ekonomi sosial dan memiliki dampak yang tidak langsung di masyarakat.

Faktor yang menjadi penyebab ketimpangan bersifat multidimensi dan saling terkait. Secara umum, ketimpangan distribusi pendapatan merupakan akibat pertumbuhan ekonomi atau hasil pembangunan yang terjadi belum mampu dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan kata lain, distribusi pendapatan antarmasyarakat atau antarkelompok masyarakat tidak merata. Perbedaan penguasaan sumber-sumber ekonomi antarmasyarakat atau antarkelompok yang tidak merata mengakibatkan semakin tingginya perbedaan pendapatan sehingga dikatakan ketimpangan semakin besar.

Aspek pertumbuhan ekonomi memiliki relevansi yang kuat dengan aspek ketimpangan. Pertumbuhan ekonomi idealnya mampu dinikmati secara merata oleh masyarakat, dan apabila hal tersebut tidak terjadi maka munculnya masalah ketimpangan. Peran atau kontribusi pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan yang terjadi berjalan secara tidak langsung, namun melalui suatu mekanisme transmisi.

Pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta sepanjang 2011-2018 menunjukkan tren yang menurun, namun dipandang masih cukup tinggi, bahkan lebih tinggi dari pertumbuhan Jawa Tengah dan nasional.



Sumber: BPS Kota Surakarta, 2019.

Gambar 2.3. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kota Surakarta Tahun 2010-2018

Dari Gambar di atas pertumbuhan ekonomi selama 2010-2018 menunjukkan penurunan cukup besar di tahun 2014 dan selanjutnya mulai 2014 hingga 2018 pertumbuhan ekonomi cenderung stagnan. Penurunan pertumbuhan ekonomi yang terjadi di tahun 2014 dari 6,25% di tahun 2013 menjadi hanya 5,28% di tahun 2014 disebabkan karena cukup banyak sektor ekonomi yang memiliki proporsi tinggi mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi di tahun 2014. Sektor konstruksi misalnya, pada tahun 2013 tumbuh sebesar 3,92% dan tahun 2014 turun menjadi 3,65% padahal sektor ini memiliki pangsa

sekitar 26%. Demikian pula dengan sektor perdagangan yang mengalami penurunan pertumbuhan sebesar -3,17% dari 2013 ke 2014 dan pangsa sektor ini juga cukup besar yaitu 24%. Sektor industri pengolahan pun juga menunjukkan penurunan pertumbuhan sebesar -2,16% dari 2013 ke 2014.

Bila dibandingkan pertumbuhan dari 2011 ke 2018 terlihat sebagian besar sektor menunjukkan penurunan. Penurunan pertumbuhan terbesar terjadi pada sektor jasa pendidikan dari 13,06% di tahun 2011 menjadi hanya 5,80% di tahun 2018 atau mengalami penurunan sebesar -7,25%. Sektor lain yang juga menunjukkan penurunan pertumbuhan adalah sektor perdagangan besar dan eceran dari 10,45% di tahun 2011 menjadi hanya 4,95% di tahun 2018 atau mengalami penurunan sebesar -5,50%. Demikian pula dengan beberapa sektor lain yang menunjukkan penurunan pertumbuhan secara variatif. Secara keseluruhan, bila dibandingkan pertumbuhan sektor Antara 2011 dan 2018, dari 17 sektor atau lapangan usaha terdapat 10 sektor yang mengalami penurunan dalam hal pertumbuhan dan ada 7 sektor yang menunjukkan peningkatan pertumbuhan.

Tabel 2.10. Perbandingan Pertumbuhan Sektor Ekonomi 2011 dan 2018

Sektor	Pertumbuhan 2011	Pertumbuhan 2018	Naik/Turun
Pertanian. Kehutanan. dan Perikanan	8,24	3,98	-4,26
Pertambangan dan Penggalian	-5,32	-1,58	3,73
Industri Pengolahan	6,76	4,15	-2,61
Pengadaan Listrik dan Gas	8,17	4,99	-3,18
Pengadaan Air. Pengelolaan Sampah. Limbah dan Daur Ulang	2,36	4,64	2,28
Konstruksi	1,91	5,07	3,16
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10,45	4,95	-5,50
Transportasi dan Pergudangan	4,54	5,69	1,15
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,16	4,16	-4,00
Informasi dan Komunikasi	8,50	12,11	3,61
Jasa Keuangan dan Asuransi	4,50	3,35	-1,15
Real Estate	7,09	2,54	-4,55
Jasa Perusahaan	11,19	9,06	-2,13
Administrasi Pemerintahan. Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,81	3,02	0,21
Jasa Pendidikan	13,06	5,80	-7,25
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	12,05	8,78	-3,27
Jasa lainnya	3,27	7,12	3,85
PDRB ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2010	6,42	5,33	-1,09

Sumber: BPS Kota Surakarta, 2019.

Dari sisi strukturnya PDRB Surakarta didominasi oleh kontribusi sektor konstruksi sebesar 27,16%. sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 22,4%. serta sektor informasi dan komunikasi sebesar 11,39%. Struktur PDRB Kota Surakarta ini dihitung berdasarkan harga berlaku. Sementara itu pertumbuhan tahun 2018 untuk sektor konstruksi berdasarkan atas dasar harga berlaku adalah 9,72%. sektor perdagangan besar dan eceran 6,99%. dan sektor informasi dan komunikasi sebesar 10,85%. Proporsi dan pertumbuhan ketiga sektor tersebut cukup besar dan menopang lebih dari 50% PDRB Surakarta. Beberapa sektor yang menunjukkan pertumbuhan tinggi di atas 7% pada tahun 2018 namun memiliki

proporsi kecil adalah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, sektor pengadaan listrik dan gas, jasa keuangan dan asuransi, jasa perusahaan, serta jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Dengan demikian sektor jasa di Surakarta memiliki perkembangan yang sangat prospektif.

Bila diperbandingkan kondisi 2010 dan 2018, berdasarkan perhitungan harga berlaku, hanya sektor informasi dan komunikasi yang memiliki kenaikan proporsi sekaligus kenaikan pertumbuhan. Bila menggunakan pendekatan harga konstan, terdapat beberapa sektor yang memiliki kenaikan baik dari sisi proporsi maupun pertumbuhan dari 2010 ke 2018, yaitu sektor pengadaan listrik dan gas, sektor transportasi dan pergudangan, sektor informasi dan komunikasi, sektor jasa perusahaan, serta sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial.

**Tabel 2.11. Struktur PDRB Kota Surakarta Atas Dasar Harga
Berlaku
Tahun 2010 dan 2018**

Lapangan Usaha	Proporsi		Pertumbuhan		Proporsi	Pertumbuhan
	2010	2018	2010	2018	2010-2018	2010-2018
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,50	0,49	13,05	7,01	Turun	Turun
Pertambangan dan Penggalan	0,00	0,00	3,28	2,68	Turun	Turun
Industri Pengolahan	7,62	8,40	11,01	6,99	Naik	Turun
Pengadaan Listrik dan Gas	0,22	0,20	8,61	8,27	Turun	Turun
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,22	0,14	4,81	4,45	Turun	Turun
Konstruksi	28,23	27,16	13,70	9,72	Turun	Turun
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	23,82	22,24	10,25	6,99	Turun	Turun
Transportasi dan Pergudangan	2,64	2,70	9,03	6,77	Naik	Turun
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,87	5,67	9,47	4,58	Naik	Turun
Informasi dan Komunikasi	11,36	11,39	7,89	10,85	Naik	Naik
Jasa Keuangan dan Asuransi	3,65	3,86	9,89	7,08	Naik	Turun
Real Estate	4,23	3,98	13,00	5,32	Turun	Turun
Jasa Perusahaan	0,64	0,83	13,98	11,43	Naik	Turun
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,46	5,57	10,35	4,94	Turun	Turun
Jasa Pendidikan	3,66	5,32	10,02	7,64	Naik	Turun
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,85	1,11	10,44	8,59	Naik	Turun
Jasa lainnya	1,04	0,93	11,30	5,87	Turun	Turun
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	100,00	100,00	11,04	7,90	Naik	Turun

Sumber: BPS Kota Surakarta, data diolah.

Tabel 2.12. Proporsi dan Pertumbuhan PDRB Kota Surakarta Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 dan 2018

Lapangan Usaha	Proporsi		Pertumbuhan		Proporsi	Pertumbuhan
	2010	2018	2010	2018	2010-2018	2010-2018
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,50	0,43	2,35	3,98	Turun	Naik
Pertambangan dan Penggalian	0,00	0,00	-0,13	-1,58	Turun	Turun
Industri Pengolahan	7,62	7,63	4,38	4,15	Naik	Turun
Pengadaan Listrik dan Gas	0,22	0,23	4,21	4,99	Naik	Naik
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,22	0,17	6,54	4,64	Turun	Turun
Konstruksi	28,23	26,08	6,72	5,07	Turun	Turun
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	23,82	23,33	6,06	4,95	Turun	Turun
Transportasi dan Pergudangan	2,64	2,89	4,89	5,69	Naik	Naik
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,87	5,01	5,49	4,16	Naik	Turun
Informasi dan Komunikasi	11,36	14,34	6,09	12,11	Naik	Naik
Jasa Keuangan dan Asuransi	3,65	3,39	7,15	3,35	Turun	Turun
Real Estate	4,23	4,31	5,80	2,54	Naik	Turun
Jasa Perusahaan	0,64	0,76	8,00	9,06	Naik	Naik
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,46	5,21	6,03	3,02	Turun	Turun
Jasa Pendidikan	3,66	4,19	7,20	5,80	Naik	Turun
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,85	1,05	4,67	8,78	Naik	Naik
Jasa lainnya	1,04	0,97	6,61	7,12	Turun	Naik
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	100,00	100,00	6,11	5,33		Turun

Sumber: BPS Kota Surakarta, data diolah.

BAB III

KONSEP DAN METODE KAJIAN

3.1. Aspek Kependudukan dalam Pembangunan Daerah

Dalam konteks pembangunan di daerah, secara internal penduduk dapat dipandang dari dua sisi, yaitu kekuatan (potensi) atau kelemahan. Penduduk akan menjadi suatu kekuatan atau potensi pembangunan di daerah apabila penduduk di daerah tersebut mampu berperan secara aktif sebagai subyek pembangunan daerah. Untuk dapat berperan sebagai subyek pembangunan, penduduk haruslah memiliki kriteria minimal sebagai berikut: *pertama*, penduduk memiliki tingkat pendidikan yang memadai. Hal ini dapat ditunjukkan antara lain melalui tingkat pendidikan yang ditamatkan sebagai besar penduduk. Hasil studi empiris yang dilakukan di berbagai negara menunjukkan bahwa tingkat pendidikan penduduk berpengaruh secara signifikan dalam kemajuan atau pembangunan daerah. *Kedua*, penduduk memiliki rasio ketergantungan yang kecil, artinya struktur penduduk didominasi oleh penduduk usia produktif. Penduduk usia produktif diharapkan mampu memberikan kontribusi dan partisipasi yang lebih besar dalam pembangunan daerah. Struktur penduduk yang didominasi oleh usia tidak produktif (anak-anak dan orang tua atau manula) dapat menghambat progresivitas pembangunan daerah. *Ketiga*, laju pertumbuhan penduduk dapat dikendalikan karena laju pertumbuhan penduduk yang tinggi dapat mendorong semakin besarnya beban rumah tangga melalui tingginya tingkat konsumsi terutama makanan. Hal ini akan menjadikan lambatnya tujuan pembangunan daerah sesuai dengan yang diharapkan.

Penduduk merupakan pusat dari kebijakan pembangunan daerah. Permasalahan penduduk merupakan permasalahan pembangunan dalam jangka panjang dan permasalahan tersebut membawa implikasi yang luas dalam pembangunan daerah. Atas dasar hal tersebut, penting bagi daerah untuk merumuskan

pembangunan yang berwawasan kependudukan. Pembangunan berwawasan kependudukan berorientasi pada pendekatan '*bottom-up planning*'. Melalui pendekatan ini, tujuan utama seluruh proses pembangunan adalah lebih memeratakan kesejahteraan penduduk daripada mementingkan tingkat pertumbuhan ekonomi. Karena itu pendekatan '*bottom-up*' berupaya mengoptimalkan penyebaran sumberdaya yang dimiliki dan potensial ke seluruh wilayah dan membangun sesuai dengan potensi dan masalah khusus yang dihadapi oleh daerah masing-masing. Pendekatan *bottom-up* mengisyaratkan kebebasan daerah atau wilayah untuk merencanakan pembangunan sendiri sesuai dengan keperluan dan keadaan daerah masing-masing. Oleh karena itu otonomi yang seluas-luasnya perlu diberikan kepada masing-masing daerah agar mampu mengatur dan menjalankan berbagai kebijaksanaan yang dirumuskan sendiri guna peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah atau kawasan yang bersangkutan. Melalui otonomi daerah, yang berarti adalah desentralisasi pembangunan, maka laju pertumbuhan antar daerah akan semakin seimbang dan serasi, sehingga pelaksanaan pembangunan nasional serta hasil-hasilnya semakin merata di seluruh Indonesia.

Terdapat beberapa ciri kependudukan di masa mendatang yang harus dicermati dalam konteks pembangunan, baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah. Ciri-ciri kependudukan tersebut antara lain:

1. Penduduk di masa depan akan semakin tinggi pendidikannya.

Penduduk yang makin berpendidikan dan sehat akan membentuk sumber daya manusia yang makin produktif. Tantangannya adalah menciptakan lapangan kerja yang memadai. Sebab bila tidak, jumlah penganggur yang makin berpendidikan akan bertambah. Keadaan ini dengan sendirinya merupakan pemborosan terhadap investasi nasional. Karena sebagian besar dana tercurah dalam sektor pendidikan, disamping kemungkinan terjadinya implikasi sosial lainnya yang mungkin timbul.

2. Penduduk yang makin sehat dan angka harapan hidup naik.

Usia harapan hidup yang tinggi dan jumlah penduduk lanjut semakin besar akan juga menuntut kebijaksanaan-kebijaksanaan yang serasi dan sesuai dengan perubahan tersebut. Suatu tantangan pula untuk dapat memanfaatkan penduduk usia lanjut yang masih potensial agar dapat dimanfaatkan sesuai pengetahuan dan pengalamannya.

3. Penduduk akan bergeser ke usia yang lebih tua.

Pada saat ini telah terjadi proses transisi umur penduduk Indonesia dari penduduk muda ke penduduk tua (*ageing process*). Pergeseran struktur umur muda ke umur tua produktif akan membawa konsekuensi peningkatan pelayanan pendidikan terutama pendidikan tinggi dan kesempatan kerja. Sedang pergeseran struktur umur produktif ke umur tua pada akhirnya akan mempunyai dampak terhadap persoalan penyantunan penduduk usia lanjut. Bersamaan dengan perubahan sosial ekonomi diperkirakan akan terjadi pergeseran pola penyantunan usia lanjut dari keluarga kepada institusi. Apabila hal ini terjadi, maka tanggung jawab pemerintah akan semakin berat.

4. Penduduk yang tinggal di perkotaan semakin banyak.

Seiring dengan peningkatan status sosial ekonomi masyarakat, presentase penduduk yang tinggal di perkotaan meningkat dari tahun ke tahun. Masalah urbanisasi akan menjadi masalah yang semakin menonjol. Penduduk perkotaan akan bertambah terus sejalan dengan pertumbuhan penduduk. Dengan demikian, tuntutan fasilitas perkotaan akan bertambah pula. Tambahan volume fasilitas perkotaan akan sangat berpengaruh terhadap keadaan dan perkembangan fisik kota yang bersangkutan. Meningkatnya sarana perhubungan dan komunikasi antar daerah, termasuk di daerah perdesaan, menyebabkan orang dari perdesaan tidak perlu lagi melakukan migrasi dan berdiam di daerah perkotaan. Mereka cukup menuju daerah perkotaan manakala diperlukan. Hal ini dapat dilakukan

dalam kurun waktu harian, mingguan, bahkan bulanan. Dengan semakin berkembangnya sarana transportasi dan komunikasi, pola mobilitas penduduk seperti itu akan semakin banyak dilakukan. sementara migrasi permanen cenderung akan makin menurun.

5. Jumlah rumah tangga akan meningkat namun ukurannya makin kecil.

Perubahan pola kelahiran dan kematian akan berpengaruh pada struktur rumahtangga. Dimasa depan ukuran rumah tangga akan semakin mengecil, namun jumlahnya akan semakin banyak. Dengan makin sedikitnya jumlah anak yang dimiliki dan disertai dengan peningkatan kesehatan penduduk, seiring tingkat pendidikan dan keterampilan yang lebih baik, memberikan kesempatan pula bagi individu maupun keluarga untuk melakukan mobilitas ke daerah lain.

6. Intensitas mobilitas penduduk yang makin tinggi.

Mobilitas penduduk yang makin tinggi baik secara internal maupun internasional menuntut jaringan prasarana yang makin baik dan luas. Selain itu akan membawa kepada pergeseran norma-norma masyarakat, seperti ikatan keluarga dan kekerabatan. Kesemuanya ini dapat membawa dampak yang berjangka panjang terhadap perubahan sosial budaya masyarakat.

7. Masih tingginya pertumbuhan angkatan kerja.

Sejalan dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi, maka laju pertumbuhan angkatan kerjanya pun cukup tinggi. Permasalahan yang ditimbulkan oleh besarnya jumlah dan pertumbuhan angkatan kerja tersebut di satu pihak menuntut kesempatan kerja yang lebih besar. Di pihak lain menuntut pembinaan angkatan kerja itu sendiri agar mampu menghasilkan keluaran yang lebih tinggi sebagai prasyarat untuk memasuki era globalisasi dan perdagangan bebas.

8. Terjadi perubahan lapangan kerja.

Sejalan dengan perkembangan ekonomi dan pembangunan pada umumnya, lapangan pekerjaan penduduk berubah dari yang bersifat primer, seperti pertanian, pertambangan, menuju lapangan pekerjaan sekunder atau bangunan. Lalu pada akhirnya akan menuju lapangan kerja tersier atau sektor jasa. Berbagai ciri dan fenomena di atas sudah sepantasnya diamati secara seksama, dalam rangka menetapkan alternatif kebijaksanaan selanjutnya.

Berdasarkan ciri-ciri kependudukan di masa mendatang, maka perlu dirumuskan *grand design* kependudukan. *Grand design* ini diperlukan khususnya untuk mendukung keberhasilan pembangunan. *Grand design* meliputi tiga aspek yaitu: pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, serta pembangunan keluarga. Aspek ketiga merupakan aspek yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan dan pengangguran melalui penguatan pembangunan karakter di keluarga.

3.2. Pengangguran, Kemiskinan, Pembangunan Ekonomi Lokal

Masalah kependudukan yang seringkali dihadapi adalah masalah yang berkaitan erat dengan pengangguran. Pengangguran sendiri muncul akibat dari kesempatan kerja yang tidak sebanding dengan penawaran tenaga kerja. Tingginya penawaran kerja diakibatkan oleh meningkatnya angkatan kerja, sedangkan peningkatan angkatan kerja merupakan dampak dari meningkatnya laju pertumbuhan penduduk. Dalam angkatan kerja, jumlah penduduk yang tidak bekerja mencerminkan tingkat pengangguran yang terjadi. Pengangguran yang terjadi di suatu daerah berdampak pada tingkat kemiskinan karena kebutuhan hidup tidak dapat dipenuhi akibat tidak tersediannya lapangan kerja. Oleh karena itu semakin meningkatnya proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas perlu diperhatikan, mengingat hal ini dapat mendorong terjadinya pengangguran apabila penduduk 15 tahun ke atas tersebut tidak bersekolah dan tidak bekerja. Pengangguran yang terjadi memiliki

dampak langsung terhadap kemiskinan. Kemiskinan merupakan ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar standar atas aspek kehidupan. Ahli ekonomi Amartya K. Sen menyatakan. kemiskinan lebih terkait pada ketidakmampuan mencapai standar hidup.

Salah satu strategi mengurangi pengangguran dan kemiskinan yang banyak ditempuh oleh suatu negara berkembang adalah pengembangan ekonomi kerakyatan. Pengembangan ekonomi kerakyatan bukanlah berarti menutup pengembangan sektor industri, perdagangan, maupun sektor jasa yang berskala besar, namun pengertian pengembangan ekonomi kerakyatan adalah upaya pemberdayaan masyarakat secara luas dan nyata dalam aktivitas ekonomi berdasarkan pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal yang didukung dengan sumberdaya manusia yang terampil. Pengembangan potensi ekonomi lokal tersebut diarahkan pada pengembangan skala usaha yang lebih besar, sehingga tercipta keterkaitan ke depan dan keterkaitan ke belakang (*forward* dan *backward linkage*).

Pembangunan ekonomi lokal menurut Bank Dunia (2001) adalah “..*the process by which actors within cities and towns – our community – works collectively with public, business and non governmental sektor partners to create better conditions for economic growth and employment generation.*”. Definisi ini mengandung pengertian bahwa pembangunan ekonomi lokal: (1) melibatkan interaksi komponen masyarakat. (2) bertujuan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Lebih lanjut Bank Dunia mengatakan bahwa untuk mengembangkan ekonomi lokal, daerah perlu fokus pada: (1) penciptaan lingkungan usaha yang kondusif. (2) pengembangan sumberdaya manusia. (3) kemitraan masyarakat dan pemerintah. (4) mendorong investasi swasta ke barang publik, dan (5) membangun daya saing lokasi.

Pengertian lain dari ekonomi lokal dikemukakan oleh Blakely dan Bradshaw, yaitu proses dimana pemerintah daerah dan

organisasi masyarakat terlibat untuk mendorong, merangsang, memelihara, aktivitas usaha untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Menurut International Labour Organization (ILO), pembangunan ekonomi lokal adalah proses partisipatif yang mendorong kemitraan antara dunia usaha dan pemerintah dan masyarakat pada wilayah tertentu, yang memungkinkan kerjasama dalam perancangan dan pelaksanaan strategi pembangunan secara umum, dengan menggunakan sumber daya lokal dan keuntungan kompetitif dalam konteks global, dengan tujuan akhir menciptakan lapangan pekerjaan yang layak dan merangsang kegiatan ekonomi.

Definisi ekonomi lokal menurut Helming adalah suatu proses dimana kemitraan yang mapan antara pemerintah daerah, kelompok berbasis masyarakat, dan dunia usaha mengelola sumber daya yang ada untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan merangsang (pertumbuhan) ekonomi pada suatu wilayah tertentu, menekankan pada kontrol lokal, dan penggunaan potensi sumber daya manusia, kelembagaan dan sumber daya fisik.

Pengembangan ekonomi lokal menurut Yoga (Bappenas, 2007) memfokuskan kepada:

1. Peningkatan kandungan lokal;
2. Pelibatan *stakeholders* secara substansial dalam suatu kemitraan strategis;
3. Peningkatan ketahanan dan kemandirian ekonomi;
4. Pembangunan berkelanjutan;
5. Pemanfaatan hasil pembangunan oleh sebagian besar masyarakat lokal;
6. Pengembangan usaha kecil dan menengah;
7. Pertumbuhan ekonomi yang dicapai secara inklusif;
8. Penguatan kapasitas dan peningkatan kualitas sumber daya manusia;
9. Pengurangan kesenjangan antar golongan masyarakat, antar sektor dan antar daerah;

10. Pengurangan dampak negatif dari kegiatan ekonomi terhadap lingkungan.

Sasaran dari pengembangan ekonomi lokal pada dasarnya adalah sebagai berikut:

1. Terlaksananya upaya percepatan pengembangan ekonomi lokal melalui pelibatan pemerintah, dunia usaha, masyarakat lokal, dan organisasi masyarakat madani dalam suatu proses yang partisipatif.
2. Terbangun dan berkembangnya kemitraan dan aliansi strategis dalam upaya percepatan pengembangan ekonomi lokal diantara *stakeholder* secara sinergis.
3. Terbangunnya sarana dan prasarana ekonomi yang mendukung upaya percepatan pengembangan ekonomi lokal.
4. Terwujudnya pengembangan dan pertumbuhan UKM secara ekonomis dan berkelanjutan.
5. Terwujudnya peningkatan PAD dan PDRB.
6. Terwujudnya peningkatan pendapatan masyarakat, berkurangnya pengangguran, menurunnya tingkat kemiskinan.
7. Terwujudnya peningkatan pemerataan antar kelompok masyarakat, antar sektor dan antar wilayah.
8. Terciptanya ketahanan dan kemandirian ekonomi masyarakat lokal.

Atas dasar hal tersebut di atas, pengembangan ekonomi lokal merupakan salah satu cara yang dapat ditempuh oleh pemerintah daerah dalam rangka pembedayaan ekonomi masyarakat untuk mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan, dengan penekanan pada keterlibatan masyarakat, partisipasi pemerintah daerah, serta pengembangan aktivitas ekonomi masyarakat.

3.3. Kependudukan dan Pertumbuhan Ekonomi

Penduduk terbagi menjadi dua kelompok, yaitu penduduk usia kerja dan penduduk bukan usia kerja. Penduduk usia kerja adalah penduduk berumur 15 tahun dan lebih. Penduduk usia kerja dikelompokkan menjadi angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi.

Pengertian “bekerja” menurut BPS adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu. Kegiatan tersebut termasuk pola kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi.

Menurut BPS, penganggur terbuka, terdiri dari:

- a. Mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan.
- b. Mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha.
- c. Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan.
- d. Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) dihitung dengan cara:

$$\text{TPT} = \frac{\text{Jumlah Pengangguran}}{\text{Angkatan Kerja}} \times 100\%$$

Menurut hukum Okun (Okun's Law) pengangguran memiliki hubungan negative dengan pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi semakin rendah tingkat pengangguran yang

terjadi. Output dari perekonomian tergantung dari tenaga kerja yang dipergunakan dalam proses produksi sehingga terdapat hubungan positif antara output dengan tenaga kerja. Mengingat angkatan kerja terdiri dari penduduk yang bekerja dan pengangguran terbuka, maka semakin tinggi output semakin tinggi jumlah penduduk yang bekerja dan semakin rendah pengangguran.

Namun penelitian hubungan antara pengangguran dengan pertumbuhan ekonomi di berbagai negara menghasilkan kesimpulan yang berbeda-beda. Hal ini mengindikasikan bahwa hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pengangguran tidak berdiri sendiri, namun juga dipengaruhi variable lain seperti pengeluaran pemerintah, kebijakan ekonomi dan keuangan, dan sebagainya. Artinya, pertumbuhan ekonomi misal 2% tidak secara otomatis akan mengurangi tingkat pengangguran 2% pula.

3.4. Kemiskinan

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.

Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari.

Kondisi kemiskinan menurut BPS dapat diukur dari indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan (*Poverty Gap Index-P1*), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin

terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Indeks keparahan kemiskinan (*Proverty Severity Index-P2*) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

Berbagai studi yang dilakukan menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi mampu secara signifikan mengurangi tingkat kemiskinan, seperti Ravallion dan Chen (1997)¹ serta Adam (2002)². Penelitian lain seperti Lin di China (2008)³ dan HBhanumurthy dan HMitra (2004)⁴ di India juga menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi mampu mengurangi tingkat kemiskinan.

Kemiskinan sendiri dikenal dalam dua bentuk, kemiskinan relatif dan kemiskinan absolut. BPS memberikan pengertian bahwa kemiskinan relatif merupakan kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan. Kemiskinan secara absolut ditentukan berdasarkan ketidakmampuan untuk mencukupi kebutuhan pokok minimum seperti pangan, sandang, kesehatan, perumahan dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja. Kebutuhan pokok minimum diterjemahkan sebagai ukuran finansial dalam bentuk uang. Nilai kebutuhan minimum kebutuhan dasar tersebut dikenal dengan istilah garis kemiskinan. Penduduk yang pendapatannya di bawah garis kemiskinan digolongkan sebagai penduduk miskin.

Terminologi lain yang juga pernah dikemukakan sebagai wacana adalah kemiskinan struktural dan kemiskinan kultural.

¹ Ravallion, M dan S Chen (1997) 'What Can New Survey Data Tell Us about Recent Changes in Distribution and Poverty?' World Bank Economic Review, Vol. 11(2).

² Adams, R (2002) Economic Growth, Inequality and Poverty: Findings from a New Data Set. Policy Research Working Paper 2972, World Bank, February 2002.

³ Lin (2003). Economic Growth, Income Inequality, and Poverty Reduction in People's Republic of China. Asian Development Review, vol. 20, no. 2.

⁴ HBhanumurthy and HMitra (2004). Economic Growth, Poverty, and Inequality in Indian States in the Pre-reform and Reform Periods. Asian Development Review, vol. 21, no. 2

Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang ditengarai atau didalihkan bersebab dari kondisi struktur, atau tatanan kehidupan yang tak menguntungkan. Dikatakan tak menguntungkan karena tatanan itu tak hanya menerbitkanakan tetapi (lebih lanjut dari itu!) juga melanggengkan kemiskinan di dalam masyarakat. Di dalam kondisi struktur yang demikian itu kemiskinan menggejala bukan oleh sebab-sebab yang alami atau oleh sebab-sebab yang pribadi, melainkan oleh sebab tatanan sosial yang tak adil. Tatanan yang tak adil ini menyebabkan banyak warga masyarakat gagal memperoleh peluang dan/atau akses untuk mengembangkan dirinya serta meningkatkan kualitas hidupnya, sehingga mereka yang malang dan terperangkap ke dalam perlakuan yang tidak adil ini menjadi serba berkekurangan, tak setara dengan tuntutan untuk hidup yang layak dan bermartabat sebagai manusia.

Selanjutnya dikatakan bahwa kemiskinan kultural diakibatkan oleh faktor-faktor adat dan budaya suatu daerah tertentu yang membelenggu seseorang tetap melekat dengan indikator kemiskinan. Padahal indikator kemiskinan tersebut seyogianya bisa dikurangi atau bahkan secara bertahap bisa dihilangkan dengan mengabaikan faktor-faktor adat dan budaya tertentu yang menghalangi seseorang melakukan perubahan-perubahan ke arah tingkat kehidupan yang lebih baik.

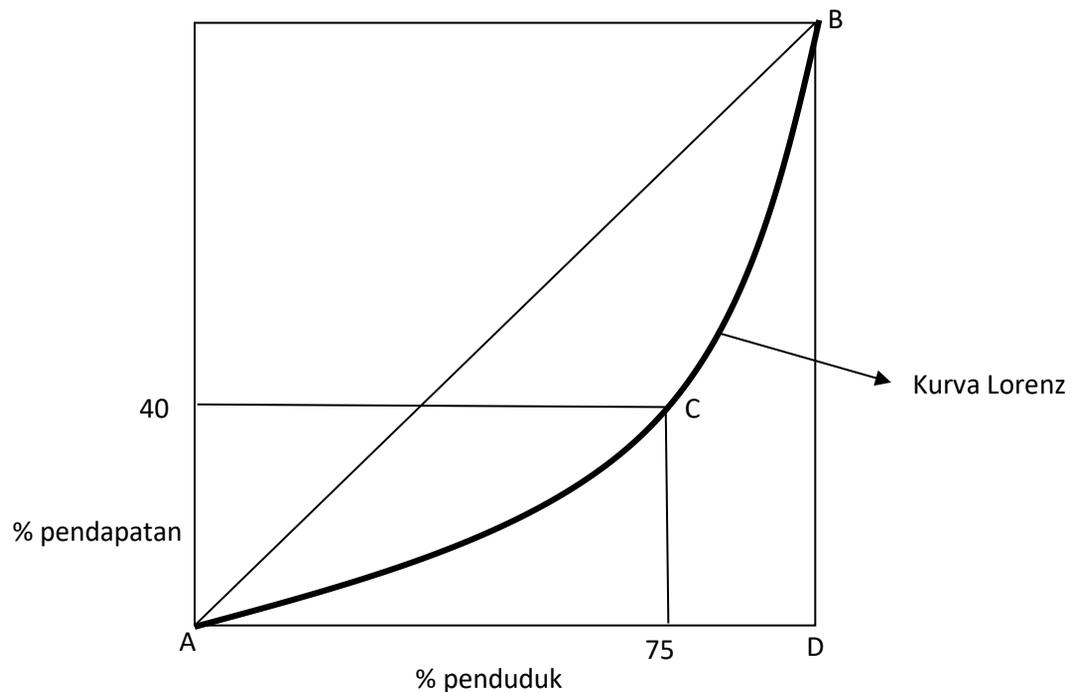
Berdasarkan uraian di atas, kemiskinan dalam berbagai bentuk dan pengertiannya merupakan masalah yang dapat muncul setiap saat sepanjang waktu di setiap daerah. Kemiskinan disebabkan oleh berbagai hal, baik karena proses pembangunan itu sendiri maupun karena struktur dan kultur masyarakat.

3.5. Ketimpangan Distribusi Pendapatan dan Pertumbuhan Ekonomi

Pendapatan per kapita diukur dengan cara membagi PDB atau PNB dengan jumlah penduduk. PDB atau PNB yang dipergunakan bisa berupa PDB atau PNB riil (atas dasar harga konstan). bisa pula PDB atau PNB harga berlaku. Jumlah penduduk yang dipergunakan adalah jumlah penduduk pertengahan tahun.

Pendapatan per kapita dipergunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk suatu wilayah secara umum. Semakin tinggi nilainya. semakin tinggi pula kemakmuran penduduk wilayah tersebut. Pendapatan perkapita tidak memiliki hubungan dengan tingkat ketimpangan pendapatan di suatu wilayah. artinya Negara yang pendapatan perkapita nya tinggi. bisa saja ketimpangannya juga tinggi. Bila hal tersebut terjadi. berarti struktur ekonomi wilayah tersebut masih tergantung pada sekelompok masyarakat tertentu. Analisis ketimpangan diperlukan mengingat apakah hasil pembangunan daerah dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat dengan lebih adil. Bila indeks ini semakin baik maka tingkat kesejahteraan masyarakat baik antar individu dan wilayahnya akan semakin membaik pula.

Ketimpangan diukur dengan menggunakan Gini Ratio. yang diturunkan dari Kurva Lorenz. Semakin tinggi nilai Gini Ratio. berarti kurva Lorenz semakin jauh dari diagonal. dan distribusi pendapatan semakin semakin tidak merata (ketimpangan semakin tajam).



Sumber: BPS Kota Surakarta, 2019.

Gambar 3.1. Kurva Lorenz

Contoh di atas: 75% penduduk menguasai 40% pendapatan (berarti 25% penduduk menguasai 60% pendapatan). Koefisien Gini= ABC/ABD.

Selain itu ketimpangan dalam distribusi pendapatan antar wilayah dapat diukur dengan Indeks Williamson sebagai berikut:

$$\text{Indeks Williamson (IW)} = \left\{ \frac{\sum (Y_i - Y_{rata2})^2 F_i / N}{Y} \right\}^{0.5}$$

Di mana:

Y = income riil per kapita kabupaten/kota

Y_i = income perkapita kecamatan

F_i = jumlah penduduk kecamatan

N = jumlah penduduk kabupaten/kota

Teori tentang ketimpangan dan pertumbuhan ekonomi dikemukakan oleh Kuznets yang menunjukkan bahwa hubungan antara ketimpangan dengan pendapatan per kapita membentuk kurva

U terbalik (inverted U shape). Pada intinya, teori tersebut menyatakan bahwa ketimpangan mula-mula akan meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi. hingga pada tahap tertentu ketimpangan akan menurun seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Namun hipotesis Kuznets tersebut tidak berlaku mutlak karena karakteristik yang berbeda antar wilayah. Selain itu, ketimpangan juga terkait dengan banyak hal.

Ketimpangan berkaitan dengan pengangguran dan kemiskinan, dan dalam hal ini pertumbuhan ekonomi merupakan syarat keharusan (necessary condition) bagi pengurangan kemiskinan sedangkan syarat kecukupannya (sufficient condition) adalah bahwa pertumbuhan ekonomi tersebut harus menyebar di setiap golongan baik secara langsung maupun tak langsung. Secara langsung mengandung arti bahwa pertumbuhan ekonomi terjadi di sektor-sektor yang di dalamnya banyak penduduk berpenghasilan rendah yang bekerja. Secara tidak langsung mengandung arti bahwa pemerintah daerah memiliki kemampuan untuk mendistribusikan pertumbuhan ekonomi dari sektor lain yang tidak didominasi penduduk berpenghasilan rendah ke golongan penduduk yang berpenghasilan rendah.

3.6. Konsentrasi Kemiskinan

Untuk melihat pola konsentrasi kemiskinan di Indonesia digunakan indeks Entropy Theil. Kelebihan indeks Entropy Theil dibandingkan dengan indeks konsentrasi spasial lainnya adalah bahwa pada suatu titik waktu, indeks ini menyediakan ukuran derajat konsentrasi (ataupun dispersi) distribusi spasial pada sejumlah daerah dan sub daerah dalam suatu negara.

Nilai indeks Entropy Theil yang lebih rendah menunjukkan kesenjangan yang lebih rendah, dan sebaliknya. Karakteristik utama dari indeks Entropy Theil ini adalah kemampuannya untuk membedakan kesenjangan antar daerah (between-region inequality) dan kesenjangan dalam satu daerah (withinregion inequality). Di

samping itu. indeks entropi Theil juga dapat dipergunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan sebagaimana Indeks Williamson.

Indeks Theil dirumuskan sebagai berikut:

$$IT = \sum (x_j / X) \cdot x \cdot \log \left(\frac{x_j / X}{y_j / Y} \right)$$

IT = Indeks Entropi Theil

X_j = jumlah penduduk miskin (pendapatan perkapita) di wilayah (kecamatan)

X = rata-rata jumlah penduduk miskin (pendapatan perkapita) di Kota Surakarta

y_j = jumlah penduduk di wilayah (kecamatan)

Y = Jumlah penduduk di Kota Surakarta

Intensitas kemiskinan juga merupakan ukuran yang menunjukkan tingkat keparahan kemiskinan di suatu daerah. Menurut KPPOD Departemen Daam Negeri. kriteria tingkat keparahan kemiskinan dinyatakan sebagai berikut:

Sangat Tinggi : apabila $I \leq \text{mean} + \text{Sd}$

Tinggi : apabila $\text{mean} + 0.5\text{Sd} \leq I < \text{mean} + \text{Sd}$

Sedang : apabila $\text{mean} - 0.5\text{Sd} \leq I < \text{mean} + 0.5\text{Sd}$

Rendah : apabila $I < \text{mean} - 0.5\text{Sd}$

Dalam hal ini. I=indikator tertentu yang dipergunakan (misal Gini Ratio. Indeks Williamson. atau Indeks Theil). *mean*=rata-rata hitung. *Sd*=deviasi standar.

3.7. Metodologi

3.7.1. Pendekatan Kajian

Untuk menghitung Indeks Williamson dan Indeks Entropi Theil dibutuhkan data PDRB dan kemiskinan di kecamatan. Data PDRB kecamatan dapat dihitung dengan pendekatan sebagai berikut:

a. Pendekatan proporsi

PDRB kecamatan saat ini diproxy berdasarkan PDRB kecamatan tahun yang sebelumnya. Bila misal PDRB Tahun 2011 adalah 100 milyar. maka akan ditentukan proporsi PDRB tersebut di masing-masing kecamatan. Selanjutnya proporsi tersebut dipergunakan sebagai proxy PDRB tahun-tahun mendatang

b. Pendekatan Konsumsi Rumah Tangga

Dalam pendekatan pengeluaran atau penggunaan. PDRB merupakan penjumlahan dari konsumsi rumah tangga. konsumsi lembaga nirlaba. pengeluaran pemerintah. pembentukan modal tetap domestic bruto. perubahan inventori dan ekspor netto. Peranan konsumsi rumah tangga cukup besar dalam PDRB. sehingga pendekatan konsumsi rumah tangga dapat dijadikan dasar untuk mengestimasi PDRB level kecamatan sebagai berikut:

$$\text{PDRB Kecamatan} =$$

$$\text{Share konsumsi kecamatan}/100 \times \text{PDRB Kota Surakarta}$$

c. Pendekatan Penduduk yang Bekerja

PDRB menurut produksi mengandung makna bahwa PDRB merupakan total seluruh nilai tambah bruto dari seluruh sektor ekonomi. sementara tenaga kerja merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi produksi selain modal dan teknologi. Suplai dari tenaga kerja adalah penduduk. yang dalam hal ini merupakan penduduk usia kerja. Dengan demikian. untuk mengestimasi PDRB level kecamatan dengan menganggap faktor selain tenaga adalah *ceteris paribus*. sehingga hanya faktor tenaga kerja yang berpengaruh terhadap output produksi dan faktor lainnya konstan. Atas dasar hal tersebut PDRB di tingkat kecamatan diproxy dengan rumus sebagai berikut:

PDRB Kecamatan =
Share jumlah penduduk kecamatan yang bekerja/100 x PDRB
Kota Surakarta

Dalam hal jumlah penduduk yang bekerja di tingkat kecamatan tidak tersedia, proxy dilakukan dengan menggunakan share jumlah penduduk masing-masing kecamatan.

3.7.2. Sumber dan Ketersediaan Data

Data dalam kajian ini bersumber dari BPS Kota Surakarta berupa Kota Surakarta Dalam Angka, Kecamatan Dalam Angka, serta PDRB Kota Surakarta. Ketersediaan data adalah sebagai berikut:

- a. PDRB Kecamatan Tahun 2010 dan 2011
- b. PRDB Kecamatan Tahun 2009 (*berdasarkan data pertumbuhan PDRB di tahun 2010*)
- c. Jumlah penduduk per kecamatan
- d. Jumlah keluarga miskin (prasejahtera) per kecamatan (Kota Surakarta Dalam Angka)

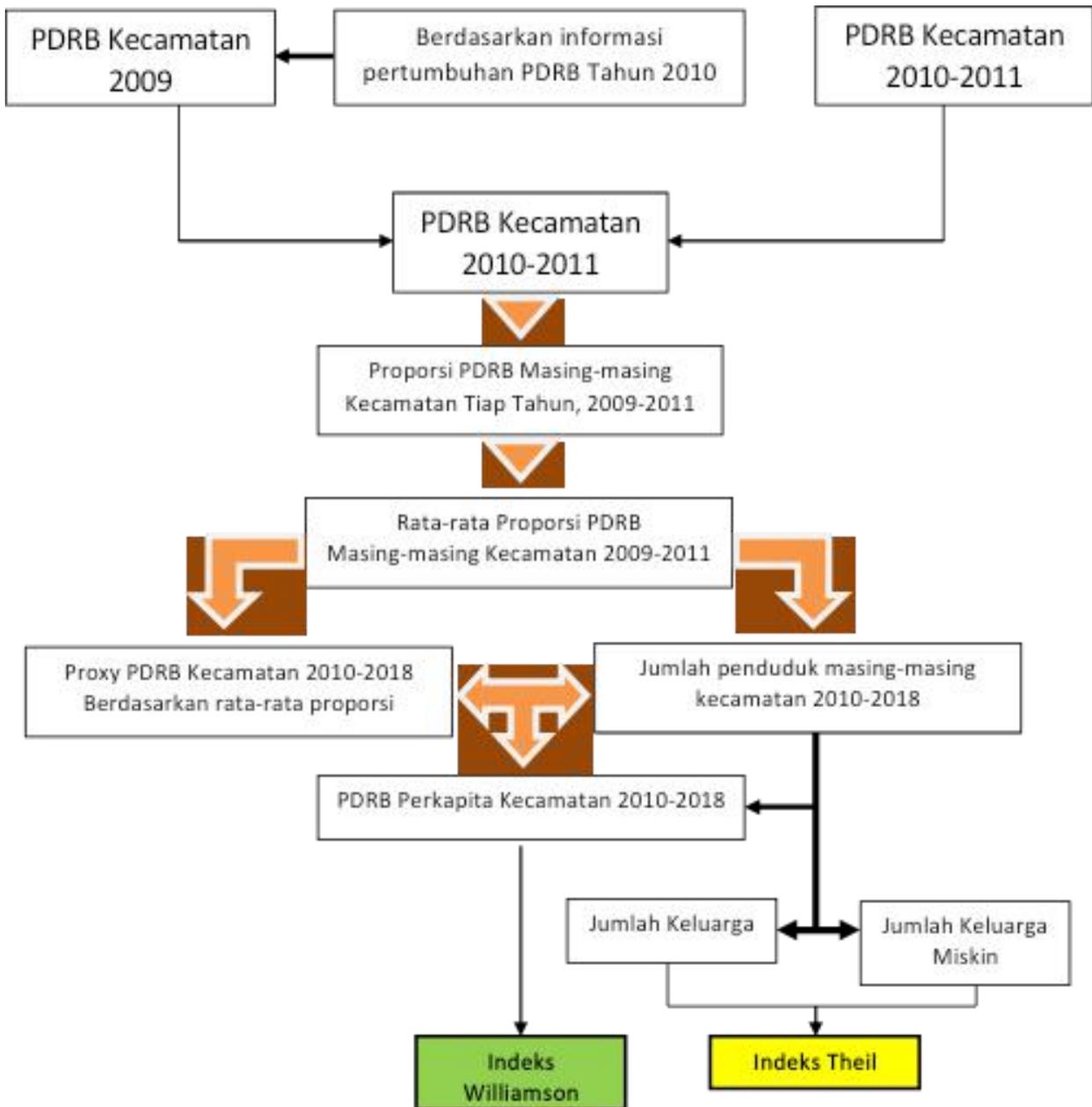
Berdasarkan ketersediaan data di atas, pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan proporsi PDRB. Pendekatan ini dipandang lebih rasional dibandingkan dengan pendekatan proporsi jumlah penduduk, mengingat pendekatan proporsi jumlah penduduk dapat menimbulkan distorsi dalam proxy PDRB karena belum jelasnya proporsi jumlah penduduk yang bekerja. Untuk pendekatan proporsi PDRB, pendekatan ini memiliki asumsi bahwa proporsi PDRB per kecamatan selama 2010-2018 adalah sama, berdasarkan pertimbangan perhitungan deviasi standar dan koefisien variasi yang kecil. Apabila terdapat perubahan proporsi maka perubahan tersebut terjadi dalam jumlah yang sangat kecil.

3.7.3. Prosedur Penentuan PDRB Kecamatan

- a. Pertama, dilakukan pengolahan data untuk memperoleh informasi PDRB Kecamatan Tahun 2009-2011 sesuai dengan ketersediaan data.

- b. Kedua. dilakukan penghitungan proporsi PDRB masing-masing kecamatan selama 2009-2011.
- c. Ketiga. dilakukan penghitungan rata-rata proporsi PDRB masing-masing kecamatan selama 2009-2011.
- d. Keempat. penggunaan rata-rata proporsi PDRB masing-masing kecamatan untuk proxy PDRB kecamatan.

3.7.4. Kerangka Pikir Kajian



BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1. Analisis Kemiskinan dan Konsumsi Penduduk

Kemiskinan merupakan kondisi seseorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak. Dalam kemiskinan, terdapat dua ukuran yang dipergunakan, yaitu tingkat kedalaman dan tingkat keparahan. Dalam hal tingkat kedalaman kemiskinan, pada tahun 2018 Kota Surakarta memiliki nilai 1,47 dan masuk peringkat 15 dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah. Nilai tersebut menunjukkan peningkatan yang cukup tinggi dibanding 2017, yang memiliki nilai 1,71 (peringkat 20). Selama 2010-2018 rata-rata tingkat kedalaman kemiskinan Surakarta adalah sebesar 1,66. Dalam hal tingkat keparahan kemiskinan, tahun 2018 Kota Surakarta memiliki nilai sebesar 0,35 dan masuk peringkat 16. Nilai ini menurun cukup drastis dibandingkan tahun 2017 yang besarnya 0,44 (peringkat 22). Rata-rata tingkat kedalaman kemiskinan selama 2010-2018 adalah sebesar 0,38. Angka ini lebih kecil bila dibandingkan dengan tingkat provinsi Jawa Tengah.

Selama 2010-2018 setiap tahun tingkat kedalaman kemiskinan Kota Surakarta rata-rata turun sebesar -4,86% dan tingkat keparahan kemiskinan rata-rata turun sebesar -5,05% per tahun. Penurunan P1 dan P2 setiap tahun ini lebih besar dibandingkan dengan provinsi Jawa Tengah yang masing-masing besarnya -4,26% dan -5,03%.

Tabel 4.1. Perbandingan Tingkat Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Tingkat Keparahan Kemiskinan (P2) Tahun 2018

Wilayah Jateng	P1	P2	Rata-rata 2010-2018		Rata-rata Pertumbuhan 2010-2017	
	2018	2018	P1	P2	P1	P2
PROVINSI JAWA TENGAH	1,85	0,45	2,32	0,59	-4,26	-5,03
Kabupaten Cilacap	1,87	0,44	2,38	0,59	-5,89	-7,34
Kabupaten Banyumas	2,6	0,7	3,13	0,82	-3,85	-4,24
Kabupaten Purbalingga	2,79	0,74	3,34	0,86	-4,40	-4,62
Kabupaten Banjarnegara	2,08	0,45	3,06	0,79	-5,75	-8,55
Kabupaten Kebumen	2,48	0,55	3,48	0,89	-4,81	-6,23
Kabupaten Purworejo	1,67	0,36	2,35	0,58	-5,70	-7,12
Kabupaten Wonosobo	3,25	0,78	4,05	1,15	-2,44	-4,10
Kabupaten Magelang	1,55	0,34	1,85	0,40	-3,43	-3,71
Kabupaten Boyolali	1,26	0,25	2,04	0,52	-7,45	-12,23
Kabupaten Klaten	1,72	0,38	2,50	0,63	-6,52	-8,15
Kabupaten Sukoharjo	0,97	0,17	1,22	0,26	-5,61	-8,30
Kabupaten Wonogiri	1,71	0,41	2,06	0,51	-6,86	-9,61
Kabupaten Karanganyar	1,7	0,43	2,00	0,47	-1,89	-1,87
Kabupaten Sragen	2,31	0,59	2,49	0,63	-2,59	-1,39
Kabupaten Grobogan	1,67	0,35	2,25	0,54	-4,82	-4,83
Kabupaten Blora	1,62	0,37	2,09	0,49	-4,69	-6,06
Kabupaten Rembang	2,86	0,78	3,14	0,78	-2,49	-0,77
Kabupaten Pati	1,37	0,29	1,82	0,43	-6,91	-10,10
Kabupaten Kudus	0,88	0,19	0,95	0,18	-0,55	2,17
Kabupaten Jepara	0,71	0,13	1,03	0,21	-5,54	-6,36
Kabupaten Demak	2,09	0,55	2,50	0,64	-7,05	-8,71
Kabupaten Semarang	1,51	0,45	1,36	0,34	0,51	4,77
Kabupaten Temanggung	1,36	0,29	1,70	0,37	-2,96	-1,97
Kabupaten Kendal	1,85	0,47	2,09	0,57	-7,59	-11,94
Kabupaten Batang	1,08	0,23	1,74	0,40	-8,97	-10,12

Wilayah Jateng	P1	P2	Rata-rata 2010-2018		Rata-rata Pertumbuhan 2010-2017	
	2018	2018	P1	P2	P1	P2
Kabupaten Pekalongan	1,4	0,31	1,86	0,40	-6,52	-6,48
Kabupaten Pemalang	2,96	0,83	3,05	0,78	-0,93	0,46
Kabupaten Tegal	1,41	0,44	1,45	0,34	-2,87	2,90
Kabupaten Brebes	3,51	1,04	3,54	0,94	-2,42	-1,46
Kota Magelang	1,07	0,21	1,34	0,30	-4,98	-7,45
Kota Surakarta	1,47	0,35	1,66	0,38	-4,86	-5,05
Kota Salatiga	0,69	0,13	0,89	0,19	-3,79	-2,56
Kota Semarang	0,58	0,12	0,66	0,15	-5,21	-8,77
Kota Pekalongan	1,01	0,22	1,02	0,20	-1,17	1,85
Kota Tegal	1,23	0,3	1,32	0,32	-4,10	-4,67

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah. diolah.

Secara umum. tingkat kemiskinan Kota Surakarta selama 2010-2018 menunjukkan tren penurunan. Tahun 2010 tingkat kemiskinan Surakarta mencapai 13.96% dan tahun 2018 turun menjadi 9.08%. Bila dipecah menjadi dua periode. selama periode 2010-2014 terjadi penurunan tingkat kemiskinan sebesar -3.01% dan pada periode 2014-2018 turun sebesar -1.87%. Dalam periode kedua tersebut penurunan tingkat kemiskinan Surakarta terlihat relative lambat bila dibandingkan dengan daerah lain di Jawa Tengah.

Dalam hal pertumbuhan tingkat kemiskinan per tahun. Kota Surakarta selama 2010-2018 memiliki rata-rata pertumbuhan -5,23% yang berarti setiap tahun rata-rata tingkat kemiskinan turun sebesar 5,23%. Angka penurunan ini tergolong tinggi bila dibandingkan dengan daerah lain. Angka ini juga lebih rendah bila dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan 2010-2017 yang mencapai -3,79%.

Tabel 4.2. Perbandingan Tingkat Kemiskinan 2010-2018

Wilayah Jateng	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Rata-rata Pertumbuhan	Naik/Turun 2010-2014	Naik/Turun 2014-2018
PROVINSI JAWA TENGAH	16,11	16,21	14,98	14,44	13,58	13,58	13,27	13,01	11,32	-4,32	-2,53	-2,26
Kabupaten Cilacap	18,11	17,15	15,92	15,24	14,21	14,39	14,12	13,94	11,25	-5,78	-3,90	-2,96
Kabupaten Banyumas	20,2	21,11	19,44	18,44	17,45	17,52	17,23	17,05	13,5	-4,91	-2,75	-3,95
Kabupaten Purbalingga	24,58	23,06	21,19	20,53	19,75	19,7	18,98	18,8	15,62	-5,51	-4,83	-4,13
Kabupaten Banjarnegara	19,17	20,38	18,87	18,71	17,77	18,37	17,46	17,21	15,46	-2,65	-1,40	-2,31
Kabupaten Kebumen	22,7	24,06	22,4	21,32	20,5	20,44	19,86	19,6	17,47	-3,22	-2,20	-3,03
Kabupaten Purworejo	16,61	17,51	16,32	15,44	14,41	14,27	13,91	13,81	11,67	-4,32	-2,20	-2,74
Kabupaten Wonosobo	23,15	24,21	22,5	22,08	21,42	21,45	20,53	20,32	17,58	-3,38	-1,73	-3,84
Kabupaten Magelang	14,14	15,18	13,97	13,96	12,98	13,07	12,67	12,42	11,23	-2,84	-1,16	-1,75
Kabupaten Boyolali	13,72	14,97	13,88	13,27	12,36	12,45	12,09	11,96	10,04	-3,83	-1,36	-2,32
Kabupaten Klaten	17,47	17,95	16,71	15,6	14,56	14,89	14,46	14,15	12,96	-3,66	-2,91	-1,60
Kabupaten Sukoharjo	10,94	11,13	10,15	9,87	9,18	9,26	9,07	8,75	7,41	-4,75	-1,76	-1,77
Kabupaten Wonogiri	15,67	15,74	14,67	14,02	13,09	12,98	13,12	12,9	10,75	-4,60	-2,58	-2,34
Kabupaten Karanganyar	13,98	15,29	14,07	13,58	12,62	12,46	12,49	12,28	10,01	-4,09	-1,36	-2,61
Kabupaten Sragen	17,49	17,95	16,72	15,93	14,87	14,86	14,38	14,02	13,12	-3,53	-2,62	-1,75
Kabupaten Grobogan	17,86	17,38	16,13	14,87	13,86	13,68	13,57	13,27	12,31	-4,55	-4,00	-1,55
Kabupaten Blora	16,27	16,24	15,1	14,64	13,66	13,52	13,33	13,04	11,9	-3,83	-2,61	-1,76
Kabupaten Rembang	23,4	23,71	21,88	20,97	19,5	19,28	18,54	18,35	15,41	-5,09	-3,90	-4,09
Kabupaten Pati	14,48	14,69	13,61	12,94	12,06	11,95	11,65	11,38	9,9	-4,64	-2,42	-2,16
Kabupaten Kudus	9,01	9,45	8,63	8,62	7,99	7,73	7,65	7,59	6,98	-3,14	-1,02	-1,01
Kabupaten Jepara	10,18	10,32	9,38	9,23	8,55	8,5	8,35	8,12	7	-4,57	-1,63	-1,55
Kabupaten Demak	18,76	18,21	16,73	15,72	14,6	14,44	14,1	13,41	12,54	-4,91	-4,16	-2,06
Kabupaten Semarang	10,5	10,3	9,4	8,51	8,05	8,15	7,99	7,78	7,29	-4,46	-2,45	-0,76
Kabupaten Temanggung	13,46	13,38	12,32	12,42	11,55	11,76	11,6	11,46	9,87	-3,80	-1,91	-1,68
Kabupaten Kendal	14,47	14,26	13,17	12,68	11,8	11,62	11,37	11,1	9,84	-4,71	-2,67	-1,96
Kabupaten Batang	14,67	13,47	12,4	11,96	11,13	11,27	11,04	10,8	8,69	-6,34	-3,54	-2,44
Kabupaten Pekalongan	16,29	15	13,85	13,51	12,57	12,84	12,9	12,61	10,06	-5,85	-3,72	-2,51
Kabupaten Pemalang	19,96	20,68	19,27	19,27	18,44	18,3	17,58	17,37	16,04	-2,70	-1,52	-2,40
Kabupaten Tegal	13,11	11,54	10,75	10,58	9,87	10,09	10,1	9,9	7,94	-6,08	-3,24	-1,93
Kabupaten Brebek	23,01	22,72	21,12	20,82	20	19,79	19,47	19,14	17,17	-3,59	-3,01	-2,83
Kota Magelang	10,51	11,06	10,31	9,8	9,14	9,05	8,79	8,75	7,87	-3,55	-1,37	-1,27
Kota Surakarta	13,96	12,9	12	11,74	10,95	10,89	10,88	10,65	9,08	-5,23	-3,01	-1,87
Kota Salatiga	8,28	7,8	7,11	6,4	5,93	5,8	5,24	5,07	4,84	-6,49	-2,35	-1,09

Wilayah Jateng	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Rata- rata Pertu mbuhan	Naik/Tu run 2010- 2014	Naik/T urun 2014- 2018
Kota Semarang	5,12	5,68	5,13	5,25	5,04	4,97	4,85	4,62	4,14	-2,62	-0,08	-0,90
Kota Pekalongan	9,36	10,04	9,47	8,26	8,02	8,09	7,92	7,47	6,75	-4,00	-1,34	-1,27
Kota Tegal	10,62	10,81	10,04	8,84	8,54	8,26	8,2	8,11	7,81	-3,77	-2,08	-0,73

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, data diolah.

Dari aspek garis kemiskinan bila dibandingkan dengan daerah lain di Jawa Tengah. Kota Surakarta memiliki garis kemiskinan yang tertinggi kedua di tahun 2018 yaitu Rp464.063,- perkapita per bulan. di bawah Kota Magelang. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan tahun 2017 yang mencapai Rp448.062,- perkapita per bulan. Kondisi ini merupakan indikasi bahwa standar hidup di Kota Surakarta lebih tinggi bila dibandingkan dengan daerah lain di Jawa Tengah. Di Kota Surakarta penduduk yang memiliki pengeluaran perkapita per bulan kurang dari Rp448.062 masuk dalam kelompok miskin. sementara di daerah sekitar lainnya tidak demikian.

Tabel 4.3. Perbandingan Garis Kemiskinan 2010-2018

Wilayah Jateng	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Kenaikan 2010- 2018	Rata- rata Pertu mbuh an 2010- 2018
PROVINSI JAWA TENGAH	217.327	217.440	233.769	261881	281.570	297.851	317.348	333.224	350.875	133.548	6,17
Kabupaten Cilacap	206.714	224.530	240.025	256615	265.714	273.828	292.525	307.041	320.106	113.392	5,62
Kabupaten Banyumas	225.546	249.807	271.800	295742	309.106	320.585	344.514	357.748	366.442	140.896	6,25
Kabupaten Purbalingga	210.349	230.461	247.508	265262	275.022	283.366	301.862	313.343	324.735	114.386	5,58
Kabupaten Banjarnegar a	173.385	192.303	205.369	221056	229.718	236.399	252.328	264.387	278.210	104.825	6,09
Kabupaten Kebumen	211.495	234.005	250.413	267763	277.280	292.177	313.881	325.819	342.437	130.942	6,21
Kabupaten Purworejo	211.400	235.459	254.314	273481	284.409	294.158	313.931	325.871	335.995	124.595	5,96
Kabupaten Wonosobo	203.216	226.827	242.047	258522	267.548	275.180	297.422	308.553	323.490	120.274	5,98
Kabupaten Magelang	184.053	204.430	218.950	235430	246.292	253.866	271.800	281.237	296.327	112.274	6,13
Kabupaten Boyolali	209.495	223.755	235.399	247.845	255.391	263.734	283.921	293.405	304.575	95.080	4,79
Kabupaten Klaten	258.854	275.002	296.530	315.566	327.231	340.484	364.240	376.305	397.447	138.593	5,51
Kabupaten Sukoharjo	227.055	240.711	259.184	279.400	291.949	303.030	327.217	337.037	345.363	118.308	5,38
Kabupaten Wonogiri	195.080	207.496	221.019	235.728	244.761	252.903	275.507	284.710	293.357	98.277	5,23
Kabupaten Karanganya r	216.954	236.093	255.072	275.865	288.814	303.056	329.531	340.538	348.896	131.942	6,12
Kabupaten Sragen	206.273	222.267	234.254	247.495	255.550	263.199	283.649	292.544	312.106	105.833	5,31
Kabupaten Grobogan	223.560	242.212	260.435	278.786	290.827	303.455	333.009	345.379	366.192	142.632	6,36
Kabupaten Blora	190.356	206.016	221.088	237.850	248.903	257.581	279.972	291.114	308.520	118.164	6,22
Kabupaten Rembang	217.846	240.859	261.156	284.160	299.503	314.596	338.986	354.440	365.443	147.597	6,68
Kabupaten Pati	244.149	264.372	288.271	314.609	332.228	347.575	377.442	393.817	414.316	170.167	6,83
Kabupaten Kudus	237.643	256.745	276.317	299.097	314.211	328.404	356.951	373.224	393.078	155.435	6,49
Kabupaten Jepara	224.737	242.963	263.266	285.287	299.914	314.422	341.754	355.607	371.296	146.559	6,48
Kabupaten Demak	228.774	254.441	276.041	299.773	315.570	328.529	356.919	371.525	402.211	173.437	7,31
Kabupaten Semarang	206.308	227.471	244.762	263.352	275.612	286.918	307.505	317.935	341.576	135.268	6,51
Kabupaten Temanggun g	178.814	198.888	212.487	229.548	240.845	248.866	268.730	277.707	287.981	109.167	6,14
Kabupaten Kendal	216.545	234.475	253.276	275.016	289.486	301.449	323.078	335.497	353.127	136.582	6,30
Kabupaten Batang	169.256	184.592	195.983	208.671	216.952	224.437	240.541	249.292	256.549	87.293	5,34
Kabupaten Pekalongan	228.674	249.958	270.026	293.039	306.281	317.796	341.648	354.435	361.297	132.623	5,88
Kabupaten Pemalang	216.365	235.316	251.986	271.861	287.358	298.622	319.434	331.584	351.183	134.818	6,24
Kabupaten Tegal	204.093	222.700	239.207	258.366	271.875	282.861	308.270	319.758	332.298	128.205	6,28
Kabupaten Brebes	239.086	261.160	281.601	307.238	327.452	340.538	364.059	382.125	405.932	166.846	6,84

Wilayah Jateng	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Kenaikan 2010- 2018	Rata- rata Pertu mbuh an 2010- 2018
Kota Magelang	258.921	280.877	313..256	350.554	376.143	405.228	425.191	450.908	476.582	217.661	7,92
Kota Surakarta	306.584	326.233	361.517	403..121	417.807	406.840	430.293	448.062	464.063	157.479	5,32
Kota Salatiga	241.223	254.726	277.039	302.884	320.204	337.511	345.146	359.944	380.856	139.633	5,87
Kota Semarang	246.195	272.996	297.848	328.271	348.824	368.477	382.160	402.297	427.511	181.316	7,14
Kota Pekalongan	251.952	270.663	294.586	322.313	338.398	352.717	375.600	390.555	415.172	163.220	6,44
Kota Tegal	270.788	280.349	305..818	333.553	353.301	371.528	395.631	418.845	455.488	184..700	6,72

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2019.

Selama 2010-2018 terlihat garis kemiskinan terus mengalami kenaikan dan posisi Kota Surakarta di atas daerah lainnya. Garis kemiskinan Kota Surakarta sempat mengalami penurunan pada tahun 2014-2015 dari Rp417.807 menjadi Rp406.840 atau turun sebesar -2,6% sementara daerah lain tidak mengalami hal tersebut. namun setelah itu menunjukkan kenaikan yang cukup tajam dibandingkan dengan daerah lain. Rata-rata pertumbuhan per tahun garis kemiskinan selama 2010-2018 adalah 5,32%. yang berarti setiap tahun rata-rata terjadi kenaikan garis kemiskinan sebesar 5,32% dibandingkan tahun sebelumnya. Angka ini tergolong kecil bila dibandingkan dengan daerah lain di Jawa Tengah.

Bila dikaitkan dengan PDRB. selama 2010-2018 pola antara pertumbuhan ekonomi dengan jumlah penduduk miskin memiliki karakteristik berbandng terbalik. Nilai koefisien korelasi keduanya adalah $r=-0,94$. Hal ini berarti pertumbuhan ekonomi di Surakarta membawa dampak pada pengurangan jumlah penduduk miskin.

Tabel 4.4. Korelasi PDRB Harga Konstan dan Jumlah Penduduk Miskin

	2014	2015	2016	2017	2018
PDRB-HK (RIBUAN)	26.984.358,61	28.453.493,87	29.966.373,01	31.562.980,46	33.260.166,38
JMLH PDDK MISKIN (RIBUAN)	55,92	55,71	55,91	54,89	46,99

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, data diolah.

Untuk mengetahui seberapa besar dampak pertumbuhan ekonomi terhadap pengurangan jumlah penduduk miskin, dilakukan perhitungan koefisien regresi (atau analisis sensitivitas) dengan mentransformasikan data PDRB dan jumlah penduduk miskin dalam logaritma. Hasil perhitungan koefisien regresi adalah $-0,7074$. Hal ini berarti apabila PDRB Harga Konstan naik 1% (pertumbuhan ekonomi tahun 2019 naik 1% dari 4,38% menjadi 5,38%), maka jumlah penduduk miskin akan berkurang sebanyak 0,70774%.

Kemiskinan berpengaruh langsung dengan konsumsi penduduk. Hal ini akan terlihat dari besarnya pengeluaran perkapita penduduk. Pengeluaran penduduk yang semakin tinggi mengindikasikan bahwa pendapatan penduduk semakin tinggi pula sehingga semakin jauh dari kategori miskin. Berdasarkan hal tersebut, rata-rata pengeluaran perkapita penduduk Kota Surakarta tahun 2018 mencapai Rp14.528.000 perkapita per tahun. Angka tersebut lebih tinggi bila dibandingkan dengan tahun 2017 yang mencapai Rp13.986.000. Angka ini adalah yang tertinggi dibandingkan dengan beberapa daerah lain di sekitar Kota Surakarta, dan tertinggi ketiga setelah Kota Salatiga dan Kota Semarang.

Sepanjang 2014-2018, rata-rata pengeluaran perkapita Kota Surakarta mengalami kenaikan sebesar 2,29% per tahun. Kenaikan tersebut sama dengan yang terjadi di provinsi Jawa Tengah.. Bila dikaitkan dengan data garis kemiskinan, pengeluaran perkapita memiliki pola yang sama dengan garis kemiskinan, namun rata-rata pertumbuhan pengeluaran perkapita jauh di bawah rata-rata pertumbuhan garis kemiskinan.

**Tabel 4.5. Perbandingan Pengeluaran Perkapita 2010-2018
(Ribuan Rp/tahun)**

Wilayah Jateng	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Rata- rata Pertum- buhan 2010- 2018
PROVINSI JAWA TENGAH	8.991,96	9.296,37	9.497,15	9.617,92	9.639,74	9.930	10.153	10.377	10.777	2,29
Kabupaten Cilacap	8.520,27	8.800,85	8.969,12	9.070,61	9.091,04	9.351	9.677	9.896	10.274	2,37
Kabupaten Banyumas	8.969,67	9.241,18	9.446,51	9.560,78	9.579,95	10.104	10.554	10.713	11.240	2,86
Kabupaten Purbalingga	7.930,41	8.228,05	8.449,59	8.535,28	8.538,62	8.938	9.159	9.340	9.786	2,66
Kabupaten Banjarnegar a	6.930,82	7.361,95	7.570,15	7.654,03	7.683,73	7.930	8.400	8.630	9.160	3,55
Kabupaten Kebumen	7.367,88	7.456,91	7.638,2	7.729,61	7.754,85	8.008	8.276	8.446	8.757	2,18
Kabupaten Purworejo	8.619,02	8.921,18	9.022,49	9.155,28	.9189,4	9.305	9.497	9.601	10.048	1,94
Kabupaten Wonosobo	9.032,28	9.274,72	9.403,93	9.458,32	9.491,02	9.736	9.877	9.969	10.503	1,90
Kabupaten Magelang	7.232,95	7.457,73	7.689,51	7.856,02	7.877,09	8.182	8.501	8.627	9.025	2,81
Kabupaten Boyolali	10.840,22	11.147,29	11.381,36	11.490,12	11.503,79	11.806	12.192	12.262	12.758	2,06
Kabupaten Klaten	10.333,17	10.592,92	10.858,3	1.0961,9	1.0965,4	11.178	11.227	11.369	11.738	1,61
Kabupaten Sukoharjo	9.638,95	9.922,39	10.111,79	10.247,4	10.264,48	10.416	10.452	10.765	11.100	1,78
Kabupaten Wonogiri	7.556,76	7.928,31	8.132,52	8.234,95	8.248,68	8.417	8.589	8.765	9.117	2,37
Kabupaten Karanganyar	9.712,07	10.023,49	10.190,83	10.285,65	10.313,38	10.486	10.722	10.933	11.223	1,82
Kabupaten Sragen	10.163,87	10.508,88	10.698,31	10.856,62	10.876,04	11.434	11.688	12.041	12.391	2,51
Kabupaten Grobogan	8.674,42	8.960,73	9.208,27	9.284,18	9.303,26	9.457	9.487	9.716	10.097	1,92
Kabupaten Blora	7.965,99	8.245,73	8.447,93	8.539,54	8.568,16	8.699	8.846	9.065	9.385	2,07
Kabupaten Rembang	8.388,92	8.705,49	8.881,77	8.994,14	9.013,01	9.122	9.453	9.736	10.191	2,46
Kabupaten Pati	8.541,02	8.828,24	8.997,04	9.087,98	9.106,28	9.380	9.548	9.813	10.190	2,23
Kabupaten Kudus	9.477,07	9.747,37	9.964,02	10.082,38	10.102,14	10.203	10.348	10.639	10.979	1,86
Kabupaten Jepara	.8550,4	8.821,42	8.999	9.176,98	9.194,97	9.504	9.695	9.745	10.169	2,19
Kabupaten Demak	8.420,51	8.727,59	8.924,47	8.982,63	9.003,5	9.118	9.377	9.544	10.001	2,17
Kabupaten Semarang	9.929,96	10.230,66	10.458,81	10.561,76	10.585,86	10.778	11.102	11.389	11.807	2,19
Kabupaten Temanggung	7.438,1	7.751,1	7.951,82	8.041,58	8.062,36	8.369	8.593	8.794	9.142	2,61
Kabupaten Kendal	9.357,73	9.701,35	9.909,52	10.079,54	10.125,64	10.419	10.631	10.863	11.257	2,34
Kabupaten Batang	7.273,52	7.609,69	7.821,37	7.966,91	8.011,69	8.244	8.568	8.805	9.203	2,98
Kabupaten Pekalongan	8.403,12	8.575,66	8.751,74	8.883,8	8.937,57	9.208	9.300	9.702	10.221	2,48
Kabupaten Pemalang	6.258,62	6.487,66	6.725,09	6.863,49	6.910,76	7.177	7.447	7.785	8.186	3,41
Kabupaten Tegal	7.429,03	7.713,16	7.894,25	8.001,08	8.049,7	8.367	8.709	9.136	9.433	3,03
Kabupaten Brebres	8.392,58	8.491,61	8.591,81	8.730,59	8.783,61	8.898	9.148	9.554	9.890	2,07
Kota Magelang	9.680,96	9.921,71	10.169,04	10.257,8	10.344,34	10.793	11.090	11.525	11.994	2,71
Kota Surakarta	12.123,32	12.464,26	12.680,17	12.819,73	12.907,29	13.604	13.900	13.986	14.528	2,29

Wilayah Jateng	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Rata- rata Pertum- buan 2010- 2018
Kota Salatiga	13.410,68	13.727,32	13.966,44	14.124,89	14.204,82	14.600	14.811	14.921	15.464	1,80
Kota Semarang	11.986,75	12.271,29	12.488,37	12.713,53	12.802,48	13.589	13.909	14.334	14.895	2,75
Kota Pekalongan	10.223,67	10.559,72	10.755,91	10.922,29	11.006,44	11.253	11.721	11.800	12.312	2,35
Kota Tegal	10.644,42	10.965,49	11.250,69	11.415,77	11.519,21	11.748	11.849	12.283	12.830	2,36

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, data diolah.

4.2. Analisis Pengangguran

Permasalahan pengangguran merupakan permasalahan yang saat ini menjadi perhatian khusus pemerintah termasuk pemerintah daerah. Pengangguran akan mendorong timbulnya permasalahan sosial lainnya. Oleh karena itu kebijakan dan strategi pembangunan daerah yang ditempuh harus diarahkan pada upaya pengurangan tingkat pengangguran. Kenaikan jumlah pengangguran yang lebih besar dibandingkan dengan kenaikan jumlah angkatan kerja akan mendorong peningkatan tingkat pengangguran. namun bila kenaikan jumlah angkatan kerja lebih besar dibandingkan dengan kenaikan jumlah pengangguran. maka tingkat pengangguran akan turun.

Bagaimanakah hubungan antara tingkat pengangguran dan pertumbuhan ekonomi? Studi yang pernah dilakukan oleh Bank Indonesia menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berkorelasi negative dengan pengurangan tingkat pengangguran. sehingga pengurangan tingkat pengangguran dapat dilakukan dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Korelasi antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran di Surakarta adalah positif $r=0,82$ namun korelasi antara tingkat pengangguran dengan PDRB adalah negative $r=-0,92$. Dengan demikian. korelasi antara PDRB dengan tingkat pengangguran lebih erat dibandingkan korelasi antara pertumbuhan ekonomi dengan tingkat pengangguran. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi PDRB diikuti dengan semakin berkurangnya tingkat pengangguran.

Tabel 4.6. Korelasi PDRB Harga Konstan dan Tingkat Pengangguran

	2014	2015	2017	2018
PDRB-HK (RIBUAN)	26.984.358,61	28.453.493,87	31.562.980,46	33.260.166,38
TINGKAT PENGANGGURAN (%)	6,16	4,53	4,47	4,39

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, data diolah.

Apabila PDRB Harga Konstan ditransformasi ke dalam nilai logaritma. akan diperoleh informasi tentang koefisien regresi yang mencerminkan nilai elastisitas antara PDRB Harga Konstan dengan tingkat pengangguran. Hasil perhitungan kedua variable tersebut adalah sebagai berikut: (a) koefisien korelasi= $r = -0,92$. koefisien regresi (elastisitas) = $-22,92$. Nilai ini mengandung arti apabila PDRB naik 1%. maka tingkat pengangguran akan berkurang 22,92%. Bila pertumbuhan ekonomi tahun 2019 naik 1% dari 4,38% menjadi 5,38% maka tingkat pengangguran dapat turun hingga mencapai 3,38% ($4,38\% \times 0.7708\%$).



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, data diolah.

Gambar 4.1. Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dengan Tingkat Pengangguran

Sementara itu hubungan antara tingkat pengangguran dengan tingkat kemiskinan menunjukkan hubungan yang searah atau berbanding lurus. Hal ini berarti peningkatan pengangguran akan berdampak pada peningkatan kemiskinan. karena semakin banyak penduduk yang bekerja berarti semakin tinggi kemampuan konsumsi mereka.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, data diolah.

Gambar 4.2. Hubungan Tingkat Pengangguran dan Tingkat Kemiskinan

Koefisien korelasi antara jumlah pengangguran dan data jumlah penduduk miskin adalah sebesar 0,8949. Apabila data jumlah pengangguran dan data jumlah penduduk miskin ditransformasikan ke dalam logaritma, akan diperoleh nilai koefisien korelasi jumlah pengangguran dan jumlah penduduk miskin adalah $r=0,9077$ dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,8283.

Tabel 4.7. Korelasi Jumlah Pengangguran dan Jumlah Penduduk Miskin

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2017	2018
JUMLAH PENGANGGURAN	43.668	38.721	31.790	36.663	31.422	23.204	23.070	22.735
JMLH PDDK MISKIN (RIBUAN)	69,80	64,50	60,70	59,70	55,92	55,71	54,89	46,99

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, data diolah.

Hal ini berarti apabila jumlah pengangguran turun 1%, maka jumlah penduduk miskin akan turun sebesar 0,8283%. Misal jumlah pengangguran tahun 2018 22.734 orang dan tahun 2019 turun sebesar 10% menjadi 20.460 orang, maka jumlah penduduk miskin pada tahun 2019 akan turun sebesar 8,283% menjadi 43.098 orang. Untuk mencari tingkat kemiskinan.

tergantung dari pertumbuhan penduduk di tahun 2019 kaena tingkat kemiskinan adalah rasio antara jumlah penduduk miskin dengan jumlah penduduk.

4.3. Analisis Proxy PDRB Kecamatan

4.3.1. Pendekatan Proporsi PDRB Atas Dasar Harga Konstan

Berdasarkan informasi PDRB kecamatan di Kota Surakarta. PDRB Kecamatan Banjarsari adalah yang tertinggi dibandingkan dengan kecamatan lainnya sedangkan PDRB terendah adalah PDRB Kecamatan Serengan. PDRB Kecamatan Pasar Kliwon dan Jebres terlihat tidak jauh berbeda pada tahun 2009 dan 2010 namun pada tahun 2011 PDRB Kecamatan Pasar Kliwon menunjukkan peningkatan yang cukup pesat.

Bila dilihat pertumbuhannya dari 2009 ke 2011. PDRB Banjarsari mengalami pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 6,46% selama dua tahun tersebut. Pertumbuhan tertinggi kedua adalah PDRB Kecamatan Pasar Kliwon yaitu sebesar 6,16% selama 2009-2011.

Dari sisi proporsinya. Kecamatan Banjarsari memiliki proporsi tertinggi dikarenakan memang memiliki PDRB yang paling tinggi dibandingkan dengan kecamatan lain. Selama 2009-2011. proporsi PDRB di setiap kecamatan terlihat konstan. Hal ini terlihat dari nilai deviasi standard dan koefisien variasi selama 2009-2011 yang sangat kecil. Dengan mempertimbangkan perhitungan ini. proporsi PDRB masing-masing kecamatan diasumsikan konstan sehingga proporsi tersebut dapat dipergunakan sebagai dasar untuk melakukan proxy PDRB masing-masing kecamatan selama 2010-2018. Alternatif lain. proporsi tumbuh sangat kecil sesuai dengan pertumbuhan selama 2009-2011.

Tabel 4.8. PDRB Kecamatan Harga Konstan Tahun 2009. 2010. dan 2011

Kecamatan	2009	2010	2011
Laweyan	780.396,59	829.651,05	877.731,73
Serengan	639.125,97	675.682,80	720.058,65
Pasar Kliwon	1.025.379,62	1.092.722,41	1.155.634,77
Jebres	980.418,87	1.039.327,29	1.101.167,26
Banjarsari	1.373.992,16	1.466.545,55	1.557.319,89
PDRB	4.799.313,21	5.103.929,10	5.411.912,30

Sumber: BPS Kota Surakarta, data dilah.

Tabel 4.9. Proporsi PDRB Kecamatan Harga Konstan Tahun 2009. 2010. dan 2011

Kecamatan	2009	2010	2011	AVERAGE	STDEV	KOEF. VAR
Laweyan	0,1626	0,1626	0,1622	0,1624	0,0002	0,1150
Serengan	0,1332	0,1324	0,1331	0,1329	0,0003	0,2601
Pasar Kliwon	0,2137	0,2141	0,2135	0,2138	0,0002	0,1127
Jebres	0,2043	0,2036	0,2035	0,2038	0,0004	0,1722
Banjarsari	0,2863	0,2873	0,2878	0,2871	0,0006	0,2150

Sumber: BPS Kota Surakarta, data diolah.

Berdasarkan perhitungan di atas. maka PDRB masing-masing kecamatan di Kota Surakarta dihitung proporsional sesuai dengan data PDRB Kota Surakarta 2010-2018. Hasil perhitungannya adalah sebagai berikut:

Tabel 4.10. Proxy PDRB Kecamatan Tahun 2010-2018 Pendekatan Proporsi PDRB Harga Konstan 2010

Tahun	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
PDRB-HK Surakarta	21.469.551	22.848.439	24.123.782	25.631.681	26.984.359	28.453.494	29.966.373	31.562.980	33.506.170

Proxy PDRB Per Kecamatan

Kecamatan	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Laweyan	3.489.90,59	3.705.677,24	3.918.847,77	4.163.802,30	4.383.541,33	4.622.198,66	4.867.962,08	5.127.326,95	5.442.993,28
Serengan	2.842.24296	3.040.000,56	3.205.293,23	3.405.645,77	3.585.374,11	3.780.576,07	3.981.590,21	4.193.729,22	4.451.918,16
Pasar Kliwon	4.596.509,75	4.878.950,28	5.156.708,10	5.479.037,28	5.768.186,06	6.082.228,93	6.405.622,51	6.746.913,88	7.162.290,85
Jebres	4.371.904,48	4.648.995,04	4.916.321,77	5.223.625,18	5.499.294,93	5.798.698,31	6.107.016,50	6.432.398,15	6.828.411,81
Banjarsari	6.168.987,52	6.574.816,29	6.926.610,71	7.359.570,79	7.747.962,18	8.169.791,90	8.604.181,71	9.062.612,25	9.620.556,30
PDRB	21.469.551	22.848.439	24.123.782	25.631.681	26.984.359	28.453.494	29.966.373	31.562.980	33.506.170

Sumber: BPS Kota Surakarta, data diolah.

4.3.2. Pendekatan Proporsi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku

Pendekatan atas dasar harga berlaku pada prinsipnya menggunakan metodologi yang sama dengan pendekatan harga konstan. Pendekatan ini menggunakan dasar PDRB Kecamatan Harga Berlaku Tahun 2009-2011 serta menggunakan pendekatan proporsi.

Tabel 4.11. Proporsi PDRB Kecamatan Harga Berlaku

Kecamatan	2009	2010	2011	AVERAGE	STDEV	KOEF. VAR
Laweyan	0,1657	0,1656	0,1659	0,1657	0,0001	0,0672
Serengan	0,1308	0,1300	0,1299	0,1302	0,0004	0,2890
Pasar Kliwon	0,2138	0,2142	0,2152	0,2144	0,0006	0,2715
Jebres	0,2016	0,2009	0,1999	0,2008	0,0007	0,3462
Banjarsari	0,2882	0,2892	0,2891	0,2888	0,0005	0,1610

Sumber: BPS Kota Surakarta, data diolah.

Tabel 4.12. Proxy PDRB Kecamatan Tahun 2010-2018 Pendekatan Proporsi PDRB Harga Berlaku

Tahun	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
PDRB-HB Surakarta	21.469.551	23.909.011	26.425.273	29.081.312	32.062.446	34.970.374	37.791.266	41.066.139	44.308.603

Proxy PDRB Per Kecamatan									
Kecamatan	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Laweyan	3.557.971	3.962.242	4.379.242	4.819.405	5.313.444	5.795.350	6.262.834	6.805.551	7.342.898
Serengan	2.796.154	3.113.864	3.441.578	3.787.495	4.175.753	4.554.476	4.921.863	5.348.376	5.770.669
Pasar Kliwon	4.602.794	5.125.783	5.665.237	6.234.657	6.873.774	7.497.196	8.101.959	8.804.049	9.499.191
Jebres	4.311.327	4.801.198	5.306.492	5.839.854	6.438.499	7.022.444	7.588.911	8.246.542	8.897.665
Banjarsari	6.201.306	6.905.924	7.632.726	8.399.901	9.260.977	10.100.909	10.915.700	11.861.621	12.798.180
PDRB	21.469.551	23.909.011	26.425.273	29.081.312	32.062.447	34.970.374	37.791.266	41.066.139	44.308.604

Sumber: BPS Kota Surakarta, data diolah.

4.4. Ketimpangan Distribusi Pendapatan

Berdasarkan data di atas, ketimpangan distribusi pendapatan antarkecamatan di Kota Surakarta disajikan sebagaimana tabel di bawah ini. Berdasarkan tabel tersebut rata-rata nilai Indeks Williamson terkecil adalah Kecamatan Banjarsari dan terbesar adalah Kecamatan Jebres.

Tabel 4.13. Indeks Williamson di Kecamatan dan Kota Surakarta Tahun 2010-2018 Pendekatan PDRB Harga Konstan

Kecamatan	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Laweyan	0,08044	0,08218	0,07747	0,07679	0,07628	0,07576	0,06834	0,07062	0,06785
Serengan	0,05074	0,05533	0,06501	0,06733	0,06811	0,06707	0,08798	0,08654	0,08886
Pasar Kliwon	0,13253	0,13180	0,11964	0,12176	0,11764	0,11774	0,11797	0,12354	0,11810
Jebres	0,10551	0,10904	0,11846	0,11731	0,12068	0,12112	0,13344	0,13471	0,13435
Banjarsari	0,05280	0,05463	0,04901	0,05917	0,05102	0,04933	0,09123	0,09384	0,09321
Indeks Williamson Kota Surakarta	0,2116	0,2161	0,2135	0,2182	0,2151	0,2143	0,2475	0,2532	0,2495

Sumber: BPS Kota Surakarta, data diolah.



Sumber: BPS Kota Surakarta, data diolah.

Gambar 4.3. Gambar Indeks Williamson atas dasar PDRB Harga Konstan

Tabel 4.14. Indeks Williamson di Kecamatan dan Kota Surakarta Tahun 2010-2018 Pendekatan PDRB Harga Berlaku

Kecamatan	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Laweyan	0,07266	0,07441	0,06963	0,06894	0,06843	0,06791	0,06042	0,06274	0,05993
Serengan	0,04382	0,04840	0,05801	0,06034	0,06110	0,06006	0,08093	0,07951	0,08181
Pasar Kliwon	0,13496	0,13427	0,12210	0,12424	0,12010	0,12019	0,12053	0,12611	0,12066
Jebres	0,11057	0,11405	0,12339	0,12222	0,12558	0,12604	0,13813	0,13938	0,13902
Banjarsari	0,04897	0,05079	0,04512	0,05530	0,04713	0,04544	0,08742	0,09004	0,08941
Indeks Williamson Surakarta	0,2098	0,2142	0,2115	0,2160	0,2130	0,2123	0,2446	0,2504	0,2466

Sumber: BPS Kota Surakarta, data diolah.



Sumber: BPS Kota Surakarta, data diolah.

Gambar 4.4. Gambar Indeks Williamson atas dasar PDRB Harga Berlaku

Di dalam permasalahan ketimpangan yang diukur dengan indeks Gini. Kota Surakarta memiliki rata-rata nilai indeks Gini sebesar 0,30 selama 2010-2015. Angka ini meski tergolong masih dalam batas wajar. namun perlu mendapatkan perhatian mengingat angka 0,30 masuk dalam kelompok batas atas. Nilai indeks Gini yang mendekati 0,40 dianggap sudah menjadi permasalahan serius dalam distribusi pendapatan atau ketimpangan. Sayangnya. data indeks Gini untuk tingkat kabupaten/kota hanya tersedia hingga 2015.

Nilai indeks Gini Kota Surakarta tersebut masuk dalam peringkat 32 dari 35 daerah di Jawa Tengah. Dari sisi rata-rata pertumbuhan tiap tahun. nilai indeks Gini Kota Surakarta memiliki rata-rata pertumbuhan per tahun sebesar 1,69%. Meski angka rata-rata pertumbuhan ini tergolong kecil secara relatif (dibandingkan dengan daerah lain di Jawa Tengah). namun secara absolute termasuk tinggi. Penyebab tingginya indeks Gini bersifat multi dimensi. seperti faktor ekonomi. sosial. kebijakan daerah. maupun budaya.



Sumber: BPS Kota Surakarta, data diolah.

Gambar 4.5. Perbandingan Indeks Williamson Pendekatan Proporsi PDRB dan Pendekatan Jumlah Penduduk

Berdasarkan perbandingan dua metode pendekatan diatas. pendekatan dengan proporsi PDRB menunjukkan nilai yang cenderung fluktuatif tetapi tidak terjadi ketimpangan signifikan antar kecamatan. Sedangkan dengan pendekatan jumlah penduduk menunjukkan nilai yang cenderung lebih stabil tetapi untuk Kecamatan Banjarsari memiliki gap yang lebih tinggi dibanding kecamatan lainnya.

Tabel 4.15. Perbandingan Indeks Gini 2010-2015

KAB/KOTA	RATA-RATA 2010-2015	PERINGKAT	KAB/KOTA	RATA-RATA PERTUMBUHAN	PERINGKAT
Kabupaten Pemalang	0,23	1	Kota Semarang	-0,99	1
Kabupaten Pekalongan	0,24	2	Kabupaten Sukoharjo	0,81	2
Kabupaten Pati	0,24	3	Kabupaten Sragen	1,35	3
Kabupaten Rembang	0,25	4	Kabupaten Banyumas	1,39	4
Kabupaten Jepara	0,25	5	Kota Magelang	1,45	5
Kabupaten Batang	0,25	6	Kabupaten Batang	1,56	6
Kabupaten Kebumen	0,26	7	Kota Surakarta	1,69	7
Kabupaten Kudus	0,26	8	Kabupaten Purbalingga	1,79	8
Kabupaten Brebes	0,26	9	Kabupaten Boyolali	1,79	9
Kabupaten Demak	0,26	10	Kabupaten Kebumen	1,94	10
Kota Tegal	0,26	11	Kabupaten Brebes	1,94	11
Kabupaten Grobogan	0,26	12	Kabupaten Pemalang	2,27	12
Kabupaten Tegal	0,27	13	Kota Salatiga	2,27	13
Kabupaten Purbalingga	0,27	14	Kabupaten Temanggung	2,30	14
Kabupaten Semarang	0,27	15	Kota Tegal	2,31	15
Kabupaten Cilacap	0,27	16	Kabupaten Pekalongan	2,51	16
Kabupaten Banjarnegara	0,27	17	Kota Pekalongan	2,64	17
Kabupaten Magelang	0,27	18	Kabupaten Tegal	2,74	18
Kota Pekalongan	0,27	19	Kabupaten Kendal	2,94	19
Kabupaten Boyolali	0,27	20	Kabupaten Pati	2,96	20
Kabupaten Wonogiri	0,27	21	Kabupaten Semarang	2,96	21
Kabupaten Sukoharjo	0,28	22	Kabupaten Karanganyar	3,03	22
Kabupaten Kendal	0,28	23	Kabupaten Rembang	3,06	23
Kabupaten Klaten	0,28	24	Kabupaten Banjarnegara	3,26	24
Kabupaten Wonosobo	0,28	25	Kabupaten Wonogiri	3,39	25
Kabupaten Purworejo	0,28	26	Kabupaten Wonosobo	3,46	26
Kabupaten Sragen	0,28	27	Kabupaten Demak	3,54	27
Kabupaten Blora	0,29	28	Kabupaten Cilacap	3,60	28
Kabupaten Banyumas	0,30	29	Kabupaten Grobogan	3,60	29
Kabupaten Karanganyar	0,30	30	Kabupaten Klaten	3,66	30
Kota Magelang	0,30	31	Kabupaten Jepara	3,69	31
Kota Surakarta	0,30	32	Kabupaten Magelang	3,96	32
Kabupaten Temanggung	0,31	33	Kabupaten Kudus	4,19	33
Kota Semarang	0,31	34	Kabupaten Purworejo	4,37	34
Kota Salatiga	0,31	35	Kabupaten Blora	4,55	35

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, data diolah.

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1. Kesimpulan

1. Secara umum, kinerja makroekonomi Kota Surakarta bila dibandingkan dengan daerah lain di Jawa Tengah cukup bagus. Beberapa indikator makroekonomi seperti kemiskinan dan konsumsi penduduk menunjukkan kinerja makroekonomi Kota Surakarta masuk dalam peringkat atas.
2. Indikator tingkat pengangguran menunjukkan Kota Surakarta masuk dalam peringkat atas dengan tingkat penurunan pengangguran tergolong tinggi di Provinsi Jawa Tengah
3. Proxy PDRB atau ketimpangan distribusi pendapatan antarkecamatan di Kota Surakarta baik berdasarkan harga berlaku maupun harga konstan menunjukkan rata-rata nilai Indeks Williamson terkecil adalah Kecamatan Banjarsari yang artinya tingkat ketimpangan penduduk terendah dan Indeks Williamson terbesar adalah Kecamatan Jebres yang artinya tingkat ketimpangan penduduk tertinggi.
4. Angka ketimpangan distribusi pendapatan Kota Surakarta menunjukkan tren yang meningkat. Hal ini terlihat dari nilai indeks Gini maupun pengukuran menggunakan Indeks Williamson. Namun demikian ketimpangan 2018 mengalami penurunan dibandingkan 2017. Meskipun beberapa kasus menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta memiliki relevansi dengan tingkat ketimpangan, namun hal ini tidak terjadi di Kota Surakarta berdasarkan pengukuran nilai koefisien korelasi. Dengan demikian, permasalahan ketimpangan distribusi pendapatan di Kota Surakarta tidak berkorelasi langsung dengan pertumbuhan ekonomi, namun oleh faktor lain.

5.2. Rekomendasi

Kebijakan pengentasan kemiskinan dapat dikategorikan menjadi 2 (dua). yaitu kebijakan tidak langsung. dan kebijakan yang langsung. Kebijakan tak langsung meliputi (1) upaya menciptakan ketentraman dan kestabilan situasi ekonomi. sosial dan politik; (2) mengendalikan jumlah penduduk; (3) melestarikan lingkungan hidup dan menyiapkan kelompok masyarakat miskin melalui kegiatan pelatihan. Sedangkan kebijakan yang langsung mencakup: (1) pengembangan data dasar (base data) dalam penentuan kelompok sasaran (targeting); (2) penyediaan kebutuhan dasar (pangan. sandang. papan. kesehatan. dan pendidikan); (3) penciptaan kesempatan kerja; (4) program pembangunan wilayah; dan (5) pelayanan perkreditan.

Beberapa rumusan kebijakan yang perlu disusun oleh Pemerintah Kota Surakarta adalah sebagai berikut:

A. Pengembangan basis data kemiskinan

Program	Arah
Penyusunan profil kemiskinan penduduk berdasarkan indikator dan kriteria yang jelas di setiap kecamatan	Dimilikinya basis data kemiskinan penduduk yang lengkap dan komprehensif di setiap kecamatan. sehingga memudahkan penyusunan strategi seras diperolehnya gambaran riil faktor-faktor penyebab kemiskinan yang (mungkin) berbeda di setiap wilayah

B. Pemberdayaan kelembagaan ekonomi masyarakat yang mampu mendorong tumbuhnya aktivitas ekonomi masyarakat lokal

Program	Arah
Pengembangan usaha ekonomi rakyat di berbagai wilayah sesuai dengan potensi ekonomi lokal melalui kerjasama antar SKPD terkait	Meningkatkan akses usaha masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan
Peningkatan efisiensi dan efektivitas alokasi dana untuk pengembangan ekonomi masyarakat lokal	Memberdayakan usaha rakyat lokal dengan memanfaatkan sumberdaya manusia lokal dalam rangka menekan angka kemiskinan.

Pelatihan dan pendampingan manajemen usaha kecil secara periodik	Meningkatkan kemampuan usaha kecil dalam mengembangkan pasar. sehingga berdampak pada penyerapan tenaga kerja lokal.
Optimalisasi dana APBD untuk mengembangkan kapasitas masyarakat lokal dalam ekonomi	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui usaha ekonomi kecil yang terdapat di setiap kampung. serta pengelolaan dana bantuan bergulir secara optimal

C. Pengembangan kualitas sumber daya manusia untuk mendorong aktivitas ekonomi masyarakat lokal

Program	Arah
Penyuluhan dan pelatihan secara periodik guna mendorong motivasi masyarakat untuk melakukan dan mengembangkan aktivitas ekonomi	Memberikan kesadaran pentingnya upaya untuk melakukan aktivitas ekonomi dengan memberikan rangsangan yang sesuai dengan situasi dan kondisi.
Pengembangan Balai Latihan Kerja sesuai dengan potensi ekonomi lokal	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pembekalan keterampilan teknis sebagai langkah awal melakukan atau mengembangkan usaha
Peningkatan <i>link and match</i> antara dunia pendidikan dengan dunia usaha	Mengembangkan sekolah kejuruan serta memperluas media praktik siswa agar siap kerja setelah lulus. sehingga mengurangi pengangguran dan kemiskinan dalam jangka panjang.
Pengendalian laju pertumbuhan penduduk melalui penyuluhan dan bimbingan. dan layanan KB dalam rangka peningkatan kesejahteraan	Memberikan kesadaran kepada penduduk tentang semakin beratnya beban daerah dan keluarga apabila jumlah penduduk tidak diatur.

DAFTAR PUSTAKA

- BPS (2019). www.bps.go.id
- BPS Provinsi Jawa Tengah (2019). www.jatengprov.bps.go.id
- BPS Kota Surakarta (2019). Produk Domestik Regional Bruto Kota Surakarta 2010-2016.
- BPS Kota Surakarta (2019). Kota Surakarta dalam Angka
- Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta (2019). *Data Kependudukan Kota Surakarta*.
- Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (2019). *Pusat Data dan Informasi Ketenagakerjaan*.
- Pemerintah Kota Surakarta (2019). *Realisasi APBD 2018 Kota Surakarta*.
- Cahyadin. Malik. 2010. Modul Analisis Ekonomi Pembangunan. Jurusan Ekonomi Pembangunan FE UNS. Hal 4-10. Surakarta.
- Samuelson. Paul A. & William D. Nordhaus. (1995). *Makro-Ekonomi*. Edisi ke-empat belas. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Soepono. Prasetyo. 1993. Analisis *Shift-Share*: Perkembangan dan Penerapan. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*. Vo. VIII No. 1 Hal. 43 – 54. Yogyakarta.

LAMPIRAN

